



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III**

**PEMBUATAN DESAIN PETA JALUR EVAKUASI DAN
PRASARANA PENDUKUNG EVAKUASI MELALUI
PEMBUATAN *LEAFLET* DAN POSTER DI LINGKUNGAN
KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI**

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Farhan, S.T.
NIP : 20020802 202505 1 001
Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Pertama
**Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Kerinci**
Kelas/Kelompok : 4
No. Absen : 40
Angkatan : XIV

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
2025**



LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKTUALISASI

JUDUL : Pembuatan Desain Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi melalui pembuatan *leaflet* dan poster di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

NAMA : Muhammad Farhan, S.T.

NIP : 20020802 202505 1 001

PANGKAT/GOL : Penata Muda/IIIA

JABATAN : Analis Kebencanaan Ahli Pertama

ANGKATAN/KELOMPOK : XIV/4

NO. ABSEN : 40

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal ... Oktober Tahun 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Bukittinggi, ... Oktober 2025

Coach

Mentor

Faisal Roza, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19761014 200112 1 001


Ir. Frans Mellas Pratama, S.T., M.T.
NIP. 19820118 201101 1 003

Mengetahui
Kepala Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi

Sarjayadi, S.S., M.AP
NIP. 19700304 199603 1 001



BERITA ACARA SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI

Pada Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan XIV Tahun 2025

JUDUL : Pembuatan Desain Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi melalui pembuatan *leaflet* dan poster di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

DISUSUN OLEH : Muhammad Farhan, S.T.

KELAS/KELOMPOK : 4 (Angkatan XIV)

NO. PRESENSI : 40

INSTANSI : Dinas PUPR Kabupaten Kerinci

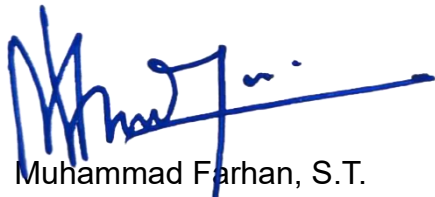
JABATAN : Analis Kebencanaan Ahli Pertama

Dan telah mendapatkan pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor, *Coach*, dan Moderator

COACH

PESERTA

Faisal Roza, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19761014 200112 1 001



Muhammad Farhan, S.T.
NIP. 20020802 202505 1 001

PENGUJI

MENTOR

Shohibul Azmi Rivai, S.E., M.Si.
NIP. 19751013 200801 1 001



Mr. Frans Mellas Pratama, S.T., M.T.
NIP. 19820118 201101 1 003



KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Aktualisasi ini. Dokumen ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan Latihan Dasar (LATSAR) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025.

Rancangan yang dihadirkan dalam karya ini mengusung judul “Pembuatan Desain Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi melalui pembuatan leaflet dan poster di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.”.

Proses penulisan ini tidak terlepas dari kontribusi, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Atas hal tersebut, penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang mendalam disertai ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan.

1. Ibu Ir. Maya Novefri Handayani, S.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci
2. Faisal Roza, S.Kom., M.Kom., sebagai *coach* yang senantiasa membimbing, memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan rancangan aktualisasi
3. Bapak Ir. Frans Mellas Pratama, S.T., M.T., selaku mentor yang senantiasa membimbing dan memberikan motivasi, arahan serta masukan dalam penyusunan rancangan aktualisasi



4. Orang tua dan keluarga tercinta, atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama pelaksanaan latsar
5. dr. Apridya Nurhafizah, yang selalu mendampingi dan mengiringi dengan penuh *support* dan semangat
6. Rekan – rekan CPNS yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan selama pelaksanaan latsar
7. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa rancangan ini belum sempurna dan masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu, segala bentuk kritik, masukan, maupun saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.

Harapan penulis, rancangan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung penguatan penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK serta berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, transparan, dan selaras dengan perkembangan teknologi modern.

Kerinci, Oktober 2025

Peserta

Muhammad Farhan, S.T.
NIP. 20020802 202505 1 001



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	I
RANCANGAN AKTUALISASI	I
BERITA ACARA SEMINAR.....	II
RANCANGAN AKTUALISASI	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	4
C. Ruang Lingkup.....	4
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA	5
A. Profil Instansi	5
B. Profil Peserta	12
BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI	14
A. Deskripsi <i>Core Isu</i>	14
B. Analisis <i>Core Isu</i>	31
C. Rumusan Isu.....	32
D. Gagasan Kreatif Penyelesaian <i>Core Isu</i>	34
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	35
A. Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi	35
B. Matriks Rancangan Aktualisasi	36



C. MATRIKS REKAPITULASI RENCANA HABITUASI NILAI-NILAI DASAR PNS (BerAKHLAK)	57
D. Capaian Penyelesaian <i>Core Isu</i>	58
E. Manfaat Terselesaikannya <i>Core Isu</i>	60
F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi	61
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Rekomendasi	66
LAMPIRAN	68
DAFTAR PUSTAKA	122



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Hasil Analisa dengan metode APKL	32
Tabel 3. 2 Hasil Analisa dengan metode USG	33
Tabel 4. 1 Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	35
Tabel 4. 2 Matriks Rancangan Aktualisasi.....	37
Tabel 4. 3 Matriks Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai – Nilai Dasar PNS	57
Tabel 4. 4 Perbandingan Kondisi Core Isu Sebelum dan Sesudah Aktualisasi.....	58
Tabel 4. 5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat..	6
Gambar 2. 2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.....	8
Gambar 4. 1	Pemasangan Peta Jalur Evakuasi Bersama Sekretaris Dinas	58
Gambar 4. 2	Sebelum Pemasangan Petunjuk Arah Jalur Evakuasi	58
Gambar 4. 3	Sebelum Pemasangan Tanda Titik Kumpul	58
Gambar 4. 4	Peta Jalur Evakuasi Setelah Pemasangan.....	58
Gambar 4. 5	Pemasangan Petunjuk Arah Jalur Evakuasi	58
Gambar 4. 6	Pemasangan Tanda Titik Kumpul	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1.....	69
Lampiran 2.	Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-2.....	77
Lampiran 3.	Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3 & 4	88
Lampiran 4.	Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-5.....	101
Lampiran 5.	Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-6.....	111



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi karena berada di zona subduksi aktif dalam jalur *Ring of Fire*. Sekitar 75 persen wilayah Kabupaten Kerinci masuk kategori rawan bencana (BPBD Kerinci, 2018). Peristiwa gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi akibat aktivitas Gunung Kerinci pada tahun 2019 membuktikan kerentanan tersebut, yang tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat.

Data BPS Kabupaten Kerinci (2024) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 telah terjadi sebanyak total 131 kejadian bencana di kabupaten Kerinci, yang terbagi menjadi bencana alam banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Sejumlah penelitian akademis turut menguatkan temuan ini, misalnya studi geotektonik dengan metode mikrotremor HVSR yang berhasil memetakan zona bahaya gempa bumi di Kerinci (Zulfan, Hadi, & Mairizwan, 2022). Maka diperlukan adanya upaya mitigasi, salah satunya dengan penerapan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek fundamental yang wajib dipenuhi di setiap tempat kerja, termasuk lingkungan kantor pemerintahan. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci, sebagai salah satu instansi pelayanan publik, memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan



pegawai serta masyarakat yang berkunjung. Hal ini sejalan dengan PP No. 16 Tahun 2021 Selain itu, ketentuan teknis penyediaan jalur evakuasi dan sarana pendukung keselamatan diatur dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 serta SNI 03-1746-2000.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan, sarana dan prasarana keselamatan di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci masih belum optimal. Ketiadaan peta jalur evakuasi, tanda arah evakuasi, titik kumpul, serta sarana pendukung seperti *emergency exit* menimbulkan risiko tinggi apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi. Kondisi ini dapat menyebabkan kebingungan, keterlambatan evakuasi, bahkan potensi korban jiwa akibat tidak adanya panduan yang jelas. Padahal, peta evakuasi dan sarana keselamatan bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan penghuni gedung.

Selain menyangkut aspek teknis dan regulasi, permasalahan ini juga berkaitan erat dengan Agenda III LATSAR ASN, yang mencakup perencanaan ASN, pengembangan kompetensi, pelaksanaan tugas jabatan, evaluasi kinerja, serta pembinaan dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Ketiadaan sarana evakuasi menghambat perencanaan penempatan pegawai saat kondisi darurat, membatasi pengembangan kompetensi terkait prosedur keselamatan, serta mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja dalam situasi krisis.



Dampak dari ketidaktersediaan sarana keselamatan ini tidak hanya dirasakan oleh pegawai, tetapi juga masyarakat yang datang untuk mengakses layanan publik. Ketidaktahuan jalur evakuasi dapat memicu kepanikan massal yang berpotensi menimbulkan keributan saat bencana terjadi. Situasi ini tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme instansi pemerintah yang seharusnya menjadi teladan dalam penerapan standar keselamatan kerja. Secara hukum, ketidakpatuhan terhadap regulasi keselamatan juga dapat menimbulkan konsekuensi administratif dan sanksi sesuai Permenaker No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3 serta Permendagri No. 114/2018.

Berdasarkan uraian tersebut, keberadaan sarana dan prasarana keselamatan, khususnya jalur evakuasi, merupakan hal yang perlu untuk diwujudkan di kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. Upaya ini diperlukan untuk menjamin keselamatan pegawai, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi standar regulasi, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan akuntabel. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk membuat rancangan aktualisasi dengan judul **“Pembuatan Desain Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi melalui pembuatan *leaflet* dan poster di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci”**.



B. Tujuan

Tujuan rancangan aktualisasi terbagi menjadi dua. Berikut merupakan tujuan dari rancangan aktualisasi,

1). Tujuan Umum

Aktualisasi ini diarahkan untuk memungkinkan penulis mengimplementasikan nilai-nilai fundamental profesi ASN yang termuat dalam konsep BerAKHLAK, yang mencakup Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabilitas, Kompetensi, Harmoni, Loyalitas, Adaptabilitas, serta Kolaborasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan pilar literasi digital Smart ASN, yang meliputi keterampilan digital (*Digital Skill*), keamanan digital (*Digital Safety*), etika digital (*Digital Ethics*), serta budaya digital (*Digital Culture*).

2). Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang telah dicapai dalam penyusunan aktualisasi ini adalah mendesain dan menyediakan peta dan prasarana pendukung evakuasi di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kegiatan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan yang sesuai dengan rancangan aktualisasi yang telah disusun.
- 2) Waktu pelaksanaan aktualisasi dari rancangan ini adalah mulai dari tanggal 10 September – 17 Oktober 2025.
- 3) Pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan di wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.



BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

A. Profil Instansi

Berikut merupakan detail profil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci,

1). Gambaran Umum

Secara administratif, Kabupaten Kerinci berada di bagian barat Provinsi Jambi dan memiliki batas wilayah yang bersinggungan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat serta Provinsi Bengkulu. Dari sisi geografis, area ini terletak pada koordinat 01°40'–02°26' Lintang Selatan dan 101°08'–101°50' Bujur Timur. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Kerinci memiliki nilai strategis, karena berperan sebagai jalur konektivitas utama yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat dan Bengkulu. Secara umum wilayah Kabupaten Kerinci memiliki batas administrasi:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu;
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi



Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kerinci, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor infrastruktur dan permukiman. Berdirinya dinas ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur pembentukan serta susunan perangkat daerah. Ruang lingkup tugasnya mencakup pengelolaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pembangunan perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman.



Gambar 2. 1 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Secara lokasi, kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci berada di Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, yang merupakan salah satu pusat pemerintahan di wilayah tersebut. Jika diukur dari Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi, jarak tempuh menuju Kabupaten Kerinci mencapai kurang lebih 425 kilometer. Letak geografis ini menjadikan keberadaan dinas ini penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur yang berkesinambungan.



2). Visi dan Misi

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci menetapkan visi dan misi organisasi. Visi yang diusung oleh dinas ini adalah:

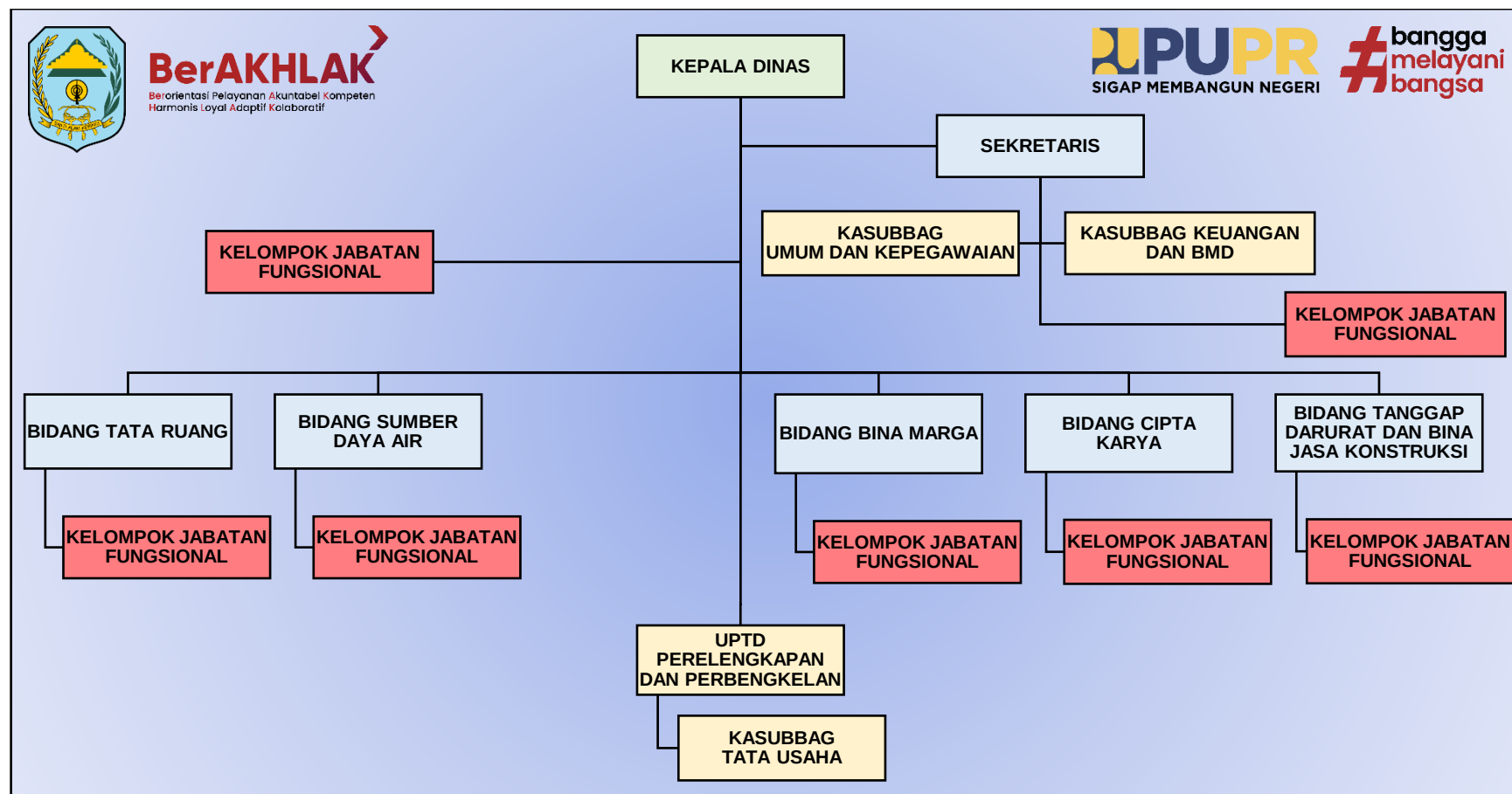
“Mewujudkan Infrastruktur yang Layak Mendukung Terciptanya Kerinci Lebih Baik.”

Untuk mengimplementasikan visi tersebut, diperlukan rumusan misi yang berfungsi sebagai arah strategis dalam menyatukan langkah dan kebijakan organisasi. Misi dipandang sebagai dasar operasional yang mengarahkan seluruh program agar sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci menetapkan sejumlah misi sebagai panduan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi.

- a) Menyelenggarakan kewenangan sebagai unsur pelaksanaan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- b) Melaksanakan tugas-tugas perbantuan yang diserahkan/dilimpahkan kepada daerah.
- c) Menciptakan SDM yang berkualitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d) Meningkatkan kontribusi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
- e) Melaksanakan program kegiatan infrastruktur yang baik



3). Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci



4). Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci memiliki peran utama sebagai unsur pendukung Kepala Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam menjalankan peran tersebut, dinas ini melaksanakan berbagai fungsi yang menjadi bagian integral dari tanggung jawabnya dengan penjabaran sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d) Melaksanakan administrasi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kerinci sesuai dengan tugas dan fungsinya

5). Nilai - Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



a) Berorientasi Pelayanan

Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya sebagai aparatur pelayan publik, ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk memberikan layanan dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Orientasi utama dalam pelaksanaan tugas adalah kepentingan masyarakat, yang diwujudkan melalui sikap rendah hati serta upaya berkesinambungan untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal.

b) Akuntabel

Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan

ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Kerinci memiliki kapasitas sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat, menunaikan tugas dengan menjunjung tinggi amanah serta integritas. Setiap langkah dan kebijakan yang diambil senantiasa didasarkan pada prinsip akuntabilitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

c) Kompeten

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Kerinci melaksanakan peran sebagai penyelenggara pelayanan publik secara profesional dengan menekankan kompetensi dan kualitas kerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.



d) Harmonis

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan

ASN Dinas PUPR Kabupaten Kerinci menunaikan tugas dengan kesungguhan serta dedikasi tinggi, disertai komitmen untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

e) Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

ASN Dinas PUPR Kabupaten Kerinci menjalankan tugas dengan loyalitas tinggi, disertai komitmen terhadap integritas serta kesetiaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

f) Adaptif

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

ASN Dinas PUPR Kabupaten Kerinci melaksanakan tugas dengan semangat tinggi, menunjukkan responsivitas terhadap setiap perubahan, serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap dinamika pekerjaan dan kebutuhan masyarakat.

g) Kolaboratif

Kami membangun kerja sama yang sinergis

ASN Dinas PUPR Kabupaten Kerinci menjalankan tugas dengan mengedepankan kreativitas dan inovasi, membangun kolaborasi yang efektif baik, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif, menyenangkan, dan produktif.



B. Profil Peserta



Nama Lengkap : Muhammad Farhan, S.T.

NIP : 20020802 202505 1 001

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 02 Agustus 2002

Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Pertama

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Kerinci

Email : mohfarhan00746@gmail.com

Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Analis Kebencanaan Ahli Pertama, penulis melaksanakan tugas pokok berupa pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kebencanaan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan penanggulangan bencana sesuai Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2024 dan Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2021. Fungsi yang dilaksanakan meliputi identifikasi dan inventarisasi data potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah; penyusunan peta risiko serta kajian kebencanaan; monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana; serta penyusunan rekomendasi strategis berbasis analisis.



Selain itu, penulis berperan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan agar tercipta sinergi penanggulangan bencana. Dengan pelaksanaan tugas tersebut, penulis berkontribusi dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana.



BAB III

RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Core Isu

Keberhasilan organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sangat bergantung pada penerapan sistem kerja yang terorganisir, efektif, dan efisien, sekaligus mampu meningkatkan kualitas layanan. Berdasarkan hasil observasi serta pengalaman empiris selama menjalankan tugas, terdapat sejumlah kendala yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis menyeluruh terhadap permasalahan atau isu tersebut agar dapat dirumuskan strategi pemecahan yang tepat melalui proses aktualisasi.

1) Belum Optimalnya Sistem Pendataan Informasi Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci

a) Kondisi Isu Saat Ini

Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci belum memiliki sistem pendataan informasi kerusakan infrastruktur akibat bencana yang terintegrasi dan real-time. Proses pendataan masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan laporan tertulis dari petugas lapangan atau pihak kecamatan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan data, potensi terjadinya



duplikasi informasi, serta kesulitan dalam melakukan analisis kerusakan secara cepat untuk pengambilan keputusan.

Kondisi geografis Kabupaten Kerinci yang rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi semakin memperbesar urgensi ketersediaan sistem pendataan yang cepat dan akurat. Menurut BNPB (2023), kecepatan dan akurasi data kerusakan infrastruktur pascabencana sangat memengaruhi efektivitas penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur publik. Tanpa sistem informasi yang baik, proses rehabilitasi menjadi lambat, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Standar pengelolaan informasi kebencanaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya pengelolaan data dan informasi bencana yang terintegrasi. Selain itu, Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana mengamanatkan bahwa data kerusakan dan kerugian harus dihimpun secara sistematis dan akurat sebagai dasar perencanaan pemulihan.

Namun, berdasarkan observasi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, belum tersedia perangkat lunak atau sistem aplikasi yang mendukung penginputan data secara digital dan terpusat. Sebagian besar pendataan masih berbasis laporan



manual dalam bentuk dokumen fisik atau file spreadsheet sederhana. Akibatnya, proses validasi dan verifikasi memerlukan waktu lama, sehingga pengambilan keputusan untuk perbaikan infrastruktur menjadi terhambat.

Dampak dari belum optimalnya sistem pendataan ini tidak hanya memengaruhi efektivitas kerja Dinas PUPR, tetapi juga berimplikasi pada keterlambatan pemulihan infrastruktur yang menjadi kebutuhan vital masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip manajemen bencana yang diatur dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan risiko bencana.

b) Dampak dan Pihak yang Terkena Dampak Isu

Belum optimalnya sistem pendataan informasi kerusakan infrastruktur akibat bencana di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek pelayanan publik dan manajemen infrastruktur. Dampak pertama terlihat pada proses pengambilan keputusan yang menjadi lambat karena data kerusakan tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak tersedia secara real-time. Hal ini menghambat proses perencanaan perbaikan maupun rehabilitasi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterlambatan pemulihan infrastruktur pasca bencana. Dampak kedua adalah



peningkatan biaya penanganan bencana karena keterlambatan dan ketidakakuratan informasi mengakibatkan perencanaan anggaran tidak tepat sasaran, sehingga terjadi pemborosan sumber daya.

Selain itu, dampak yang dirasakan masyarakat cukup besar. Masyarakat pengguna jalan dan fasilitas umum menjadi pihak yang juga terdampak karena keterlambatan perbaikan infrastruktur berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, distribusi logistik, dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dinas PUPR sebagai pengelola infrastruktur juga terdampak secara langsung, karena kinerja mereka dinilai kurang optimal akibat lemahnya sistem pendataan. Dampak ini juga menjalar ke pemerintah daerah secara keseluruhan karena keterlambatan perbaikan infrastruktur akan menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan.

Dalam konteks lebih luas, kurangnya sistem pendataan yang terintegrasi juga memengaruhi efektivitas koordinasi antarinstansi, misalnya dengan BPBD, Bappeda, dan instansi lainnya yang terkait dalam penanggulangan bencana. Koordinasi yang tidak didukung data akurat akan menghambat penyusunan kebijakan yang tepat. Dengan demikian, isu ini bukan hanya berdampak teknis, tetapi juga strategis terhadap ketahanan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Kerinci.



c) Keterkaitan Isu dan Substansi Agenda III

Isu Isu belum optimalnya sistem pendataan informasi kerusakan infrastruktur akibat bencana memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aspek dalam Manajemen ASN, khususnya yang dibahas dalam Agenda III LATSAR seperti perencanaan ASN, pengembangan kompetensi, pelaksanaan tugas jabatan, evaluasi kinerja, serta pembinaan dan pengawasan.

1. Perencanaan ASN

Sistem pendataan infrastruktur yang belum optimal menimbulkan kesulitan dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia secara tepat. Misalnya, tanpa data kerusakan yang akurat, sulit bagi pimpinan Dinas PUPR untuk menentukan jumlah, penempatan, dan spesialisasi pegawai yang diperlukan untuk penanganan bencana dan rehabilitasi infrastruktur. Hal ini berkaitan langsung dengan perencanaan ASN, karena perencanaan sumber daya manusia harus didasarkan pada kebutuhan kerja yang nyata dan prioritas strategis instansi. Data yang akurat akan menjadi dasar untuk menyusun formasi pegawai, mengidentifikasi kekurangan kompetensi, dan merencanakan penguatan kapasitas SDM yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan lapangan.

2. Pengembangan Kompetensi

Ketidaktersediaan data kerusakan yang terstruktur juga mempengaruhi program pengembangan kompetensi ASN.



Pegawai yang terlibat dalam pemetaan, penilaian, dan penanganan infrastruktur bencana memerlukan kemampuan teknis khusus, misalnya kemampuan menggunakan sistem informasi geografis (GIS), manajemen data bencana, dan analisis risiko. Tanpa sistem pendataan yang baik, sulit untuk merumuskan program pelatihan yang relevan, karena kebutuhan kompetensi pegawai menjadi tidak teridentifikasi secara jelas. Hal ini berimplikasi pada efektivitas pengembangan kompetensi ASN dan kesiapan mereka dalam menghadapi bencana.

3. Pelaksanaan Tugas Jabatan

Manajemen ASN menekankan keterkaitan antara tugas jabatan dengan penyelesaian tanggung jawab organisasi. Isu pendataan yang belum optimal langsung berdampak pada pelaksanaan tugas pegawai, terutama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengawasan, dan rehabilitasi infrastruktur. Tanpa data yang memadai, pegawai tidak dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien, sehingga kinerja organisasi menjadi terhambat.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja ASN sangat bergantung pada pencapaian target kerja dan penyelesaian tugas jabatan. Sistem pendataan yang belum optimal membuat pencatatan capaian pekerjaan, penilaian efektivitas intervensi, dan pelaporan hasil rehabilitasi



infrastruktur menjadi tidak lengkap. Hal ini mempersulit proses evaluasi kinerja pegawai, karena indikator kinerja berbasis bukti menjadi sulit didapatkan.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Manajemen ASN juga mencakup pembinaan dan pengawasan pegawai dalam melaksanakan tugas. Ketidadaan sistem pendataan yang terintegrasi mempersulit pengawasan terhadap progres perbaikan infrastruktur pasca bencana, sehingga pembinaan pegawai dan pengambilan keputusan strategis menjadi kurang efektif. Sistem data yang baik akan memungkinkan pimpinan memonitor secara real-time, memberikan arahan, serta melakukan intervensi bila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan tugas.

2) Belum Tersedianya Struktur Organisasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci

a) Kondisi Isu Saat Ini

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting yang wajib diterapkan di setiap lingkungan kerja, termasuk instansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), setiap perusahaan atau instansi yang memiliki karyawan dengan jumlah tertentu wajib membentuk struktur organisasi K3 untuk memastikan penerapan K3 berjalan dengan baik. Namun,



hingga saat ini Dinas PUPR Kabupaten Kerinci belum memiliki struktur organisasi K3 yang formal dan terdokumentasi.

Ketiadaan struktur ini menyebabkan koordinasi dalam penanganan keselamatan kerja kurang optimal, terutama dalam menghadapi potensi bahaya kerja di lingkungan perkantoran maupun lapangan, seperti pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur. Dampaknya, ketika terjadi insiden, penanganan cenderung tidak terkoordinasi dengan baik.

Menurut International Labour Organization (ILO), implementasi manajemen K3 yang baik memerlukan struktur organisasi yang jelas, perencanaan, serta pengawasan yang sistematis (ILO, 2013). Tanpa adanya struktur ini, risiko kecelakaan kerja, ketidaksiapan dalam menghadapi keadaan darurat, dan rendahnya kesadaran pegawai terhadap K3 akan tetap tinggi.

b) Dampak dan Pihak yang Terkena Dampak Isu

Ketiadaan struktur organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci menimbulkan berbagai dampak serius terhadap keselamatan pegawai dan efektivitas pengelolaan risiko kerja. Dampak utama dari isu ini adalah meningkatnya potensi kecelakaan kerja, terutama pada pegawai yang bekerja di lapangan dalam pengawasan proyek jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Tanpa adanya struktur formal K3, tidak ada pihak yang secara khusus bertanggung jawab untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi



pelaksanaan standar keselamatan, sehingga risiko insiden meningkat. Hal ini sejalan dengan temuan Iqbal dan Kamaludin (2021), yang menyatakan bahwa kurangnya pelatihan, kesadaran K3, dan pengawasan struktural merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan di sektor konstruksi.

Dampak selanjutnya adalah penurunan kualitas pelayanan publik, karena kecelakaan atau insiden di lapangan dapat menyebabkan absensi pegawai dan keterlambatan proses perencanaan atau pemeliharaan infrastruktur. Akibatnya, masyarakat yang bergantung pada layanan publik, seperti akses jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, mengalami gangguan yang dapat memengaruhi mobilitas dan aktivitas ekonomi mereka. Selain itu, ketiadaan struktur K3 juga berdampak pada kepatuhan terhadap regulasi, mengingat Permenaker No. 26 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi membentuk struktur organisasi K3 untuk menjamin implementasi SMK3 berjalan efektif. Ketidakpatuhan ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan menurunkan citra profesional instansi di mata publik.

Pihak yang paling terdampak langsung adalah pegawai Dinas PUPR, terutama yang bekerja di lapangan, karena mereka berhadapan langsung dengan risiko kecelakaan dan cedera. Masyarakat juga terdampak secara tidak langsung, karena keterlambatan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur



mengganggu akses terhadap layanan publik dan aktivitas sehari-hari. Selain itu, pemerintah daerah menghadapi dampak reputasional, karena ketiadaan struktur K3 menunjukkan lemahnya pengelolaan keselamatan kerja dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kapasitas instansi dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien (Kementerian Tenaga Kerja RI, 2014)

c) Keterkaitan Isu dan Substansi Agenda III

Belum tersedianya struktur organisasi K3 di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci memiliki keterkaitan yang erat dengan manajemen ASN sebagaimana dibahas dalam Agenda III LATSAR, yang mencakup perencanaan ASN, pengembangan kompetensi, pelaksanaan tugas jabatan, evaluasi kinerja, serta pembinaan dan pengawasan.

1. Perencanaan ASN

Ketiadaan struktur K3 membuat perencanaan kebutuhan pegawai terkait keselamatan dan kesehatan kerja menjadi kurang terarah. Pimpinan kesulitan menentukan jumlah, penempatan, dan kompetensi pegawai yang diperlukan untuk mengelola K3 secara efektif. Padahal, dalam manajemen ASN, perencanaan pegawai harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dan risiko pekerjaan, sehingga kekurangan struktur K3 dapat menimbulkan gap kompetensi



dan alokasi SDM yang tidak optimal (Kementerian PANRB, 2020).

2. Pengembangan Kompetensi

Struktur K3 yang belum ada juga berdampak pada pengembangan kompetensi pegawai. Program pelatihan mengenai keselamatan kerja, penanganan risiko bencana, dan penggunaan peralatan keselamatan menjadi sulit difokuskan karena tidak ada penanggung jawab yang mengidentifikasi kebutuhan kompetensi. Hal ini menghambat kesiapan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan secara aman dan profesional, serta berimplikasi pada efektivitas pengembangan kompetensi ASN.

3. Pelaksanaan Tugas Jabatan

Ketiadaan struktur K3 menyebabkan pelaksanaan tugas jabatan yang terkait keselamatan kerja menjadi tidak optimal. Pegawai yang bertugas di lapangan atau di unit operasional tidak memiliki panduan yang jelas, sehingga risiko kecelakaan kerja meningkat dan efektivitas pekerjaan menurun. Struktur organisasi K3 diperlukan agar pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan prosedur dan standar keselamatan kerja yang berlaku.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja ASN menuntut pengukuran capaian dan efektivitas kerja berdasarkan indikator yang jelas. Tanpa



struktur K3, pencapaian program keselamatan dan kesehatan kerja tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga evaluasi kinerja pegawai yang terkait menjadi sulit dilakukan secara objektif. Akibatnya, penilaian kinerja tidak mencerminkan kesiapan organisasi dalam mengelola risiko kerja dan bencana.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pegawai juga terganggu karena tidak ada struktur formal yang memastikan pemantauan, pelatihan, dan evaluasi praktik K3 berjalan sesuai standar. Hal ini mengurangi kemampuan pimpinan dalam memberikan arahan, melakukan intervensi, dan menjamin keselamatan pegawai secara menyeluruh, sehingga aspek akuntabilitas manajemen ASN kurang terjamin.

Dengan demikian, belum tersedianya struktur organisasi K3 secara langsung berdampak pada manajemen ASN. Isu ini memengaruhi perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, pelaksanaan tugas jabatan, evaluasi kinerja, dan pembinaan serta pengawasan, sehingga berisiko menurunkan keselamatan pegawai dan efektivitas organisasi. Struktur K3 yang jelas diperlukan agar ASN dapat bekerja secara profesional, aman, dan akuntabel, serta mendukung tercapainya pelayanan publik yang optimal.



3) Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Evakuasi dan Keselamatan di Lingkungan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci

a) Kondisi Isu Saat Ini

Setiap kantor pemerintahan, termasuk Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, merupakan area yang harus memenuhi standar keselamatan kerja, termasuk dalam aspek kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, dan bencana lainnya. Salah satu elemen penting dari kesiapsiagaan ini adalah keberadaan peta jalur evakuasi, tanda arah evakuasi, titik kumpul, serta sarana pendukung keselamatan seperti emergency exit dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

Berdasarkan hasil pengamatan, Dinas PUPR Kabupaten Kerinci belum memiliki peta jalur evakuasi dan tanda keselamatan yang memadai. Kondisi ini sangat berisiko ketika terjadi bencana, karena pegawai tidak memiliki panduan yang jelas untuk melakukan evakuasi dengan cepat dan aman.

Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan jalur evakuasi dan sarana pendukung keselamatan diatur dalam Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja dan SNI 03-1746-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Jalur Evakuasi dalam Bangunan Gedung. Tanpa adanya jalur evakuasi yang jelas, tingkat keselamatan penghuni



gedung sangat rendah dan berpotensi menimbulkan korban jiwa jika terjadi keadaan darurat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap tempat kerja wajib dilengkapi sarana keselamatan untuk menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja. Peta evakuasi dan prasarana pendukung bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko korban dalam kondisi darurat.

b) Dampak dan Pihak yang Terkena Dampak Isu

Belum tersedianya peta jalur evakuasi dan sarana pendukung keselamatan seperti rambu evakuasi, titik kumpul, serta tanda emergency exit memiliki dampak serius terhadap keselamatan pegawai maupun masyarakat yang berkunjung ke kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. Bagi pegawai, hal ini menimbulkan risiko kebingungan dan keterlambatan dalam proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi, kebakaran, atau bencana lainnya. Situasi ini dapat memperbesar potensi korban jiwa dan luka-luka akibat tidak terarahnya jalur evakuasi yang jelas (Kusumasari & Alam, 2012).

Selain itu, masyarakat yang datang untuk mengurus layanan publik juga terdampak secara langsung. Ketidaktahuan mereka terhadap jalur evakuasi dan titik kumpul aman dapat meningkatkan kepanikan, yang berpotensi menimbulkan kericuhan saat bencana terjadi. Dampak lanjutan adalah



menurunnya kepercayaan publik terhadap profesionalisme instansi pemerintah yang seharusnya menjadi teladan dalam penerapan standar keselamatan kerja. Hal ini dapat memicu citra negatif terhadap kinerja organisasi dan menurunkan tingkat kepuasan pelayanan publik (Saputra et al., 2020).

Dari sisi regulasi, ketidakterpenuhinya kewajiban penyediaan prasarana keselamatan seperti yang diamanatkan oleh Permenaker No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permendagri No. 114/2018 dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif. Secara umum, dampak utama yang dirasakan mencakup potensi kehilangan nyawa, meningkatnya risiko cedera, kerugian material, serta dampak psikologis akibat trauma pascabencana. Dengan demikian, ketidaktersediaan peta evakuasi dan prasarana pendukung keselamatan bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menyangkut perlindungan hak asasi untuk mendapatkan rasa aman di tempat kerja dan layanan publik (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

c) Keterkaitan Isu dan Substansi Agenda III

Belum tersedianya peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung keselamatan di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci memiliki hubungan yang erat dengan manajemen ASN sebagaimana dibahas dalam Agenda III



LATSAR, yang mencakup perencanaan ASN, pengembangan kompetensi, pelaksanaan tugas jabatan, evaluasi kinerja, serta pembinaan dan pengawasan.

1. Perencanaan ASN

Ketiadaan peta jalur evakuasi dan prasarana keselamatan menghambat perencanaan ASN yang efektif, karena pimpinan tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai kebutuhan pegawai yang harus ditempatkan pada posisi strategis saat kondisi darurat. Hal ini penting untuk memastikan setiap unit kerja memiliki jumlah pegawai yang cukup dan kompeten untuk mengevakuasi diri maupun mengelola prosedur keselamatan secara cepat dan tepat (Kementerian PANRB, 2020).

2. Pengembangan Kompetensi

Pegawai yang berada di lingkungan kantor memerlukan kompetensi dasar dalam keselamatan dan evakuasi bencana, termasuk pemahaman jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam kebakaran, serta penanganan keadaan darurat. Tanpa peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung, program pengembangan kompetensi sulit difokuskan pada kebutuhan nyata, sehingga kesiapan pegawai dalam menghadapi situasi kritis menjadi terbatas (Saputra et al., 2020).



3. Pelaksanaan Tugas Jabatan

Pelaksanaan tugas jabatan juga terdampak karena pegawai tidak memiliki panduan visual dan prasarana pendukung keselamatan yang memadai untuk melaksanakan prosedur darurat. Hal ini dapat menghambat kelancaran operasional kantor, terutama ketika harus mengevakuasi pegawai dan pengunjung, sehingga potensi risiko cedera.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja ASN menuntut indikator berbasis hasil kerja dan kepatuhan terhadap prosedur. Ketiadaan peta jalur evakuasi menyulitkan pengukuran efektivitas respons pegawai dalam kondisi darurat, sehingga evaluasi kinerja terkait keselamatan kerja menjadi tidak objektif dan tidak mencerminkan kemampuan organisasi dalam melindungi pegawai maupun masyarakat.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Dari sisi pembinaan dan pengawasan, ketiadaan jalur evakuasi dan prasarana keselamatan membatasi kemampuan pimpinan untuk melakukan monitoring, simulasi, atau pelatihan evakuasi secara rutin. Tanpa prasarana yang memadai, pegawai kurang terbiasa dengan prosedur keselamatan, sehingga potensi kesalahan atau keterlambatan dalam tindakan darurat meningkat, dan akuntabilitas manajemen ASN menjadi terganggu.



B. Analisis Core Isu

Ketiga isu yang dihadapi Dinas PUPR Kabupaten Kerinci memiliki keterkaitan yang erat karena secara bersama-sama berpengaruh terhadap keamanan, khususnya dalam keamanan dalam memberikan pelayanan, karena dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal diperlukan kenyamanan, rasa aman, dan SOP yang jelas. Untuk menentukan kelayakan isu dalam rancangan aktualisasi maka digunakan metode APKL. Metode APKL digunakan untuk menganalisis tingkat kualitas dan aktualitas suatu isu seperti yang dilakukan oleh (Angga, 2022), Bhidju (2022), Hidayat (2022), Artina (2021), Kirana (2020), Nuraeni et al. (2022), Megasari et al. (2021), Yurianto (2021), dan Rofiuddin (2021) dengan parameter:

- 1) **Aktual (A)**

Menilai apakah isu dan gagasan relevan dengan kondisi saat ini.

- 2) **Problematis (P)**

Mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul dari isu.

- 3) **Kekhalayakan (K)**

Menilai apakah isu atau gagasan menyentuh kepentingan publik atau *stakeholder*.

- 4) **Layak (L)**

Menentukan apakah gagasan bisa direalisasikan dan bermanfaat.

Berikut adalah tabel hasil dari analisis core isu dengan menggunakan metode APKL.



Tabel 3. 1 Hasil Analisa dengan metode APKL

NO.	IDENTIFIKASI ISU	PENILAIAN ISU				TOTAL	PERINGKAT
		A	P	K	L		
1	Belum Optimalnya Sistem Pendataan Informasi Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	4	4	5	5	18	2
2	Belum Tersedianya Susunan atau Struktur Organisasi K3 di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	5	4	3	5	17	3
3	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Evakuasi dan Keselamatan di Lingkungan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	5	5	4	5	19	1

Keterangan:

Angka 5 : Sangat Mendesak/ Sangat Serius/ Sangat Berdampak

Angka 4 : Mendesak/ Serius/ Berdampak

Angka 3 : Cukup Mendesak/ Cukup Serius/ Cukup Berdampak

Angka 2 : Kurang Mendesak/ Kurang Serius/ Kurang Berdampak

Angka 1 : Tidak Mendesak/Tidak Serius/Tidak Berdampak

Berdasarkan analisis isu menggunakan metode APKL di atas, penulis mendapatkan Isu **Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Evakuasi dan Keselamatan di Lingkungan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci** sebagai prioritas utama.

C. Rumusan Isu

Setelah Menentukan prioritas dari dua isu yang sudah dianalisis menggunakan metode APKL maka dilakukan identifikasi dengan metode tapisan USG. Analisis USG merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat prioritas masalah yang akan dibahas secara mendalam dan



memerlukan suatu penyelesaian yang baik dengan melihat pada aspek *Urgency, Seriousness, and Growth* (Yurianto, 2020). Metode USG sering digunakan untuk menentukan prioritas, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Naser et al. (2022), Tsaniyah et al. (2022), Iskandar et al. (2014), dan Syamsuriansyah et al. (2022) dengan parameter berikut:

- 1) *Urgency* (U) - Mengukur seberapa mendesak masalah tersebut harus segera diselesaikan.
- 2) *Seriousness* (S) - Menilai seberapa serius dampak yang ditimbulkan jika masalah tidak ditangani.
- 3) *Growth* (G) - Menilai kemungkinan masalah menjadi lebih besar atau meluas bila dibiarkan.

Tabel 3. 2 Hasil Analisa dengan metode USG

NO.	ISU	KRITERIA			JUMLAH NILAI	PERINGKAT KUALITAS
		U	S	G		
1	Belum Optimalnya Sarana Keselamatan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	4	5	5	14	2
2	Belum Optimalnya Sistem Peringatan Bencana di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	4	4	5	13	3
3	Belum Tersedianya Peta Jalur dan Prasarana Pendukung Evakuasi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	5	5	5	15	1

Keterangan:

Angka 5 : Sangat Mendesak/ Sangat Serius/ Sangat Berdampak

Angka 4 : Mendesak/ Serius/ Berdampak

Angka 3 : Cukup Mendesak/ Cukup Serius/ Cukup Berdampak

Angka 2 : Kurang Mendesak/ Kurang Serius/ Kurang Berdampak

Angka 1 : Tidak Mendesak/Tidak Serius/Tidak Berdampak

Berdasarkan analisis, maka ditetapkan *core issue* adalah **Belum Tersedianya Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi di Lingkungan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.**



D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Berdasarkan hasil analisis isu, penyebab isu, dan prioritas isu menggunakan metode USG, maka gagasan kreatif yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan core isu Belum Tersedianya Peta Jalur Evakuasi dan Sarana Pendukung Keselamatan di Lingkungan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci akan diuraikan menjadi beberapa poin penting dengan judul **Pembuatan Desain Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi melalui pembuatan *leaflet* dan poster di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.**

- 1) Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor
- 2) Merancang peta jalur evakuasi bencana di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
- 3) Membuat sarana pendukung evakuasi bencana di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
- 4) Melakukan evaluasi dan konsultasi hasil rencangan bersama mentor
- 5) Melakukan sosialisasi kepada bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Kerinci



BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan aktualisasi perlu direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Berikut merupakan timeline kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan,

Tabel 4. 1 Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No.	Kegiatan	September				Oktober		
1	Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor (1 - 6 September 2025)							
2	Merancang peta jalur evakuasi bencana di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci (7 - 20 September 2025)							
3	Membuat prasarana pendukung evakuasi bencana di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci (21 September – 4 Oktober 2025)							
4	Melakukan sosialisasi kepada bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Kerinci (5 – 11 Oktober 2025)							
5	Melakukan evaluasi dan konsultasi hasil aktualisasi bersama mentor (12 - 18 Oktober 2025)							



B. Matriks Rancangan Aktualisasi

Nama	:	Muhammad Farhan, S.T.
Unit Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci
Identifikasi Isu	:	1) Belum Tersedianya Prasarana Pendukung Evakuasi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci 2) Belum Optimalnya Sarana Keselamatan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci 3) Belum Tersedianya Peta Jalur Evakuasi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
Isu yang Diangkat	:	Belum Tersedianya Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi di Lingkungan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.
Gagasan Penyelesaian Isu	:	Pembuatan Desain Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi melalui pembuatan <i>leaflet</i> dan poster di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.



Tabel 4. 2 Matriks Rancangan Aktualisasi

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor	1. Membuat Surat Telaah Staff kepada mentor	Tersedianya <i>Draf</i> surat telaah staff.	Akuntabel Saya telah bertanggungjawab terhadap gagasan dan isu pada dokumen yang saya buat Kompeten Saya telah memberikan gagasan dan isu sesuai dengan kompetensi saya sebagai ASN Harmonis Saya telah menghargai dan	Penulis sebagai peserta LATSAR; dan mentor LATSAR.	TIDAK	-	-



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				menyesuaikan diri dengan jadwal dan arahan yang diberikan oleh mentor.				
		2. Melakukan Konsultasi rancangan aktualisasi dengan mentor	Tersedianya catatan dan dokumentasi hasil konsultasi (notulen/foto).	Akuntabel Saya telah bertanggungjawab atas rancangan aktualisasi yang saya susun. Kompeten Saya telah memberikan gagasan terkait isu sesuai dengan kompetensi saya sebagai Analis Kebencanaan Ahli Pertama saat diskusi.		TIDAK	-	



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Harmonis Saya telah menghargai pendapat dari mentor, serta mencatat dan menerapkan gagasan atau masukan yang diberikan oleh mentor berdasarkan sudut pandang mentor.				
		3. Mengajukan surat telaah staff kepada mentor	1. Tersedianya dokumentasi pengajuan surat 2. Tersedianya surat telaah staff yang ditandatangani oleh mentor.	Akuntabel Saya telah bertanggungjawab atas rancangan aktualisasi dan surat telaah staff yang saya susun.		TIDAK	-	



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Hasil: Persetujuan Mentor atas pelaksanaan gagasan aktualisasi dengan penandatanganan surat telaah staff.	Kompeten Saya telah memberikan gagasan dan pendapat sesuai dengan kompetensi sebagai Analis Kebencanaan Ahli Pertama saat diskusi dalam konsultasi. Adaptif Saya telah mengembangkan tulisan dan <i>draft</i> rancangan aktualisasi berdasarkan hasil konsultasi kembali dengan mentor untuk				



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				mendapatkan hasil yang optimal.				
2.	Merancang peta jalur evakuasi bencana di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	1. Mengidentifikasi kebutuhan data dan mengumpulkan referensi peta evakuasi bangunan	Tersedianya daftar kebutuhan data dan referensi peta evakuasi kantor	Akuntabel Saya telah bertanggungjawab atas tugas dan kegiatan yang saya lakukan Kompeten Saya telah mempelajari referensi peta evakuasi yang saya kumpulkan.	Penulis sebagai peserta LATSAR; mentor LATSAR; Rekan kerja (Staff Dinas PUPR).	TIDAK	-	-



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2. Melakukan survey <i>layout</i> kantor Dinas PUPR.	Tersedianya sketsa <i>layout</i> lingkungan kantor Dinas PUPR	Kompeten Saya telah melakukan survey dan mempelajari sketsa <i>layout</i> sebagai dasar pembuatan peta evakuasi. Kolaboratif Saya telah berkerjasama dengan rekan kerja dalam melakukan survey <i>layout</i> kantor.				
		3. Membuat peta evakuasi kantor Dinas PUPR dan mengkonsultasi	Tersedianya peta evakuasi kantor Dinas PUPR	Berorientasi Pelayanan Saya telah membuat peta evakuasi dengan desain yang efektif		TIDAK	-	



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		kannya kepada mentor	Hasil: Tersedianya desain peta evakuasi bencana kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	dan efisien dalam rangka meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan ASN dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Akuntabel Saya telah bertanggungjawab dalam pembuatan peta evakuasi.				
3.	Membuat prasarana pendukung evakuasi bencana di lingkungan	1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan referensi contoh prasarana	Tersedianya referensi contoh prasarana pendukung evakuasi.	Akuntabel Saya telah bertanggungjawab atas tugas dan kegiatan yang saya lakukan	Penulis sebagai peserta LATSAR; mentor LATSAR;	TIDAK	-	-



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	pendukung evakuasi		Kompeten Saya telah mempelajari referensi contoh prasarana pendukung evakuasi yang saya kumpulkan.	Rekan kerja (Staff Dinas PUPR).			
		2. Melakukan survey dan identifikasi titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi	Tersedianya daftar titik dan jumlah kebutuhan prasarana pendukung evakuasi	Kompeten Saya telah melakukan survey dan mengidentifikasi titik dan jumlah kebutuhan prasarana pendukung evakuasi di lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.		TIDAK	-	



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Kolaboratif Saya telah berkerjasama dengan rekan kerja dalam melakukan survey titik dan kebutuhan sarana pendukung evakuasi. Harmonis Saya telah menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan rekan kerja dalam melaksanakan survey.				



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Adaptif Saya telah melaksanakan survey dan menyesuaikan hasil survey dengan kondisi lapangan sesuai dengan kebutuhan.				
		3. Membuat prasarana pendukung evakuasi berupa tanda <i>Emergency Exit</i> , <i>Assembly Point</i> , serta petunjuk arah jalur Evakuasi	Tersedianya tanda <i>Emergency Exit</i> , <i>Assembly Point</i> , serta petunjuk arah jalur Evakuasi.	Berorientasi Pelayanan Saya telah membuat prasarana pendukung evakuasi sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan ASN dalam memberikan		TIDAK	-	



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		dan mengkonsultasi kannya kepada mentor.	Hasil: Tersedianya desain dan titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi di Kantor DINas PUPR Kabupaten Kerinci.	pelayanan optimal kepada masyarakat Akuntabel Saya telah bertanggungjawab atas pembuatan prasarana pendukung evakuasi yang saya kerjakan Kompeten Saya telah membuat desain prasarana pendukung sesuai dengan kompetensi saya sebagai Analis Kebencanaan Ahli Pertama.				



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Harmonis Saya telah melaksanakan diskusi dan melaksanakan komunikasi yang baik dengan rekan kerja terkait desain prasarana pendukung				
4.	Melakukan sosialisasi kepada bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	1. Menentukan jadwal dan menyiapkan bahan sosialisasi yang dikoordinasikan kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat dan	1. Disepakatinya jadwal sosialisasi 2. Tersedianya kuisioner sosialisasi 3. Tersedianya daftar kebutuhan dan panitia sosialisasi	Akuntabel Saya telah bertanggungjawab terhadap jadwal sosialisasi yang disepakati Harmonis Saya telah menghargai dan menyesuaikan diri	Penulis sebagai peserta LATSAR; mentor LATSAR; Rekan kerja (Staff Dinas PUPR); serta Bidang Tanggap	TIDAK	-	-



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Bina Jasa Konstruksi		dengan jadwal dan kebutuhan sosialisasi yang disepakati. Kolaboratif Saya telah bekerjasama dengan rekan kerja sebagai panitia sosialisasi dalam melaksanakan penyelenggaraan sosialisasi.	Darurat dan Bina Jasa Konstruksi.			
		2. Melakukan sosialisasi peta evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi	Tersedianya dokumentasi (foto/vidio) kegiatan sosialisasi	Akuntabel Saya telah bertanggungjawab atas kesesuaian hasil survey dan data terhadap hasil desain.		TIDAK	-	



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Harmonis Saya telah menghargai pendapat dan masukan yang diberikan saat pelaksanaan sosialisasi. Kolaboratif Saya telah bekerjasama dengan rekan kerja selama proses penyelenggaraan sosialisasi berlangsung				



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3. Melakukan tanya jawab dan menyebarkan kuisisioner sosialisasi	Tersedianya berita acara dan catatan hasil kegiatan sosialisasi Hasil: ASN memahami dan mengetahui jalur evakuasi dan posisi titik prasarana pendukung evakuasi di lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Berorientasi Pelayanan Saya telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada rekan-rekan ASN sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabel Saya telah bertanggungjawab dalam melaksanakan sosialisasi.		TIDAK	-	



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Rakyat Kabupaten Kerinci.	Kolaboratif Saya telah berkerjasama dengan rekan-rekan ASN dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi.				
5.	Melakukan evaluasi dan konsultasi hasil aktualisasi bersama mentor	1. Membuat laporan sosialisasi	Tersedianya draft <i>final</i> laporan sosialisasi	Akuntabel Saya telah bertanggungjawab atas kesesuaian hasil sosialisasi terhadap laporan sosialisasi yang disusun.	Penulis sebagai peserta LATSAR; mentor LATSAR; Rekan kerja (Staff Dinas PUPR).	TIDAK	-	-



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Harmonis Saya telah menghargai, mencatat, dan menerapkan saran atau koreksi yang diberikan oleh mentor terkait laporan sosialisasi. Kolaboratif Saya telah bekerjasama dengan rekan kerja untuk mengumpulkan dokumentasi sosialisasi				



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2. Membuat laporan aktualisasi	Tersedianya <i>draft</i> laporan aktualisasi	Akuntabel Saya telah bertanggungjawab terhadap kesesuaian hasil aktualisasi pada laporan aktualisasi. Adaptif Saya telah mengembangkan laporan aktualisasi sesuai dengan hasil implementasi. Kompeten Saya telah menyusun laporan aktualisasi dengan cermat dan teliti, serta		TIDAK	-	



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				menyampaikan hasil aktualisasi yang telah saya lakukan sesuai dengan kompetensi saya.				
		3. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor	Tersedianya catatan hasil evaluasi dan laporan akhir aktualisasi Hasil: Tersedianya laporan akhir aktualisasi yang disetujui dan ditandatangani oleh mentor.	Akuntabel Saya telah bertanggungjawab atas kesesuaian hasil aktualisasi terhadap laporan aktualisasi. Loyal Saya telah tetap loyal dan berintegritas terhadap arahan dan bimbingan yang disepakati bersama mentor.				



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Harmonis Saya telah menghargai pendapat dari mentor, serta mencatat dan menerapkan gagasan atau masukan yang diberikan oleh mentor sesuai dengan capaian yang disepakati. Adaptif Saya menyesuaikan hasil laporan aktualisasi berdasarkan arahan dan masukan dari berbagai pihak.				



C. MATRIKS REKAPITULASI RENCANA HABITUASI NILAI-NILAI DASAR PNS (BerAKHLAK)

Setelah menyusun tabel matriks rancangan aktualisasi, selanjutnya disusun matriks rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar PNS dengan detail yang dapat dilihat pada **Tabel 4. 3**,

Tabel 4. 3 Matriks Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai – Nilai Dasar PNS

]	Mata Pelatihan	Kegiatan										Jumlah Aktualisasi per MP
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4		Ke-5		
		Reencana	Realisasi	Reencana	Realisasi	Reencana	Realisasi	Reencana	Realisasi	Reencana	Realisasi	
1.	Berorientasi Pelayanan	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	3
2.	Akuntabel	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	13
3.	Kompeten	3	3	2	2	2	3	-	-	-	1	9
4.	Harmonis	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	8
5.	Loyal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
6.	Adaptif	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2	4
7.	Kolaboratif	-	-	1	1	1	1	1	3	-	1	6
Jumlah MP yang Diaktualisasikan per kegiatan		9	9	6	6	9	10	7	9	7	10	44



D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Berikut merupakan capaian penyelesaian dari core isu yang telah dilaksanakan selama aktualisasi,

Tabel 4. 4 Perbandingan Kondisi Core Isu Sebelum dan Sesudah Aktualisasi

Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
 Gambar 4. 1 Pemasangan Peta Jalur Evakuasi Bersama Sekretaris Dinas	 Gambar 4. 4 Peta Jalur Evakuasi Setelah Pemasangan
 Gambar 4. 2 Sebelum Pemasangan Petunjuk Arah Jalur Evakuasi	 Gambar 4. 5 Pemasangan Petunjuk Arah Jalur Evakuasi
 Gambar 4. 3 Sebelum Pemasangan Tanda Titik Kumpul	 Gambar 4. 6 Pemasangan Tanda Titik Kumpul



Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
Sebelum pelaksanaan kegiatan aktualisasi, upaya penyediaan sarana dan prasarana penunjang keselamatan kerja di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci belum optimal. Pada saat itu, peta jalur evakuasi belum tersedia secara visual dan terpasang di area strategis kantor, sehingga pegawai dan masyarakat yang berkunjung belum memiliki panduan yang jelas apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme keselamatan di lingkungan kerja masih memerlukan peningkatan dalam hal penyediaan informasi arah evakuasi dan titik aman. Selain itu, prasarana pendukung evakuasi seperti tanda arah jalur evakuasi, tanda titik kumpul (<i>assembly point</i>), dan tanda pintu darurat (<i>emergency exit</i>) juga masih terbatas, sehingga fungsi kesiapsiagaan terhadap potensi keadaan darurat belum berjalan secara maksimal.	Setelah pelaksanaan kegiatan aktualisasi, kondisi tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Telah tersedia peta jalur evakuasi yang dirancang dan dipasang di beberapa titik strategis, seperti area lobi dan koridor utama. Peta tersebut menampilkan jalur evakuasi yang jelas dan informatif, dilengkapi simbol keselamatan yang mudah dipahami oleh seluruh pegawai dan pengunjung. Selain itu, telah dipasang prasarana pendukung evakuasi berupa tanda arah jalur evakuasi di sepanjang koridor, tanda titik kumpul (<i>assembly point</i>) di area halaman kantor, serta tanda pintu darurat (<i>emergency exit</i>). Keberadaan sarana tersebut menjadikan sistem keselamatan di lingkungan kerja lebih terarah dan fungsional, sekaligus meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana. Melalui kegiatan sosialisasi, pegawai memperoleh pemahaman tentang arah jalur evakuasi, titik kumpul, dan prosedur evakuasi yang benar. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, setelah pelaksanaan aktualisasi, kondisi <i>core</i> isu menunjukkan perubahan positif dari yang semula belum tertata optimal menjadi lebih sistematis dan informatif. Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci kini memiliki peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung keselamatan yang berfungsi dengan baik serta dipahami oleh seluruh pegawai.



E. Manfaat terselesaikannya Core Isu

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang berfokus pada penyelesaian *core* isu “Belum Tersedianya Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi di Lingkungan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci” memberikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh individu, instansi, maupun masyarakat. Manfaat tersebut muncul sebagai hasil dari penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

1. Individu

- 1) Meningkatkan kemampuan teknis dalam merancang peta jalur evakuasi dan sarana keselamatan.
- 2) Menumbuhkan nilai Akuntabel, Kompeten, dan Kolaboratif dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Mendorong sikap Adaptif terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan instansi.
- 4) Memperkuat orientasi pelayanan melalui kontribusi nyata terhadap keselamatan kerja.

2. Instansi (Dinas PUPR Kabupaten Kerinci)

- 1) Meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan kerja melalui tersedianya peta jalur evakuasi dan sarana pendukung.
- 2) Mendukung penerapan nilai Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan dalam lingkungan kerja.



- 3) Meningkatkan profesionalisme dan citra positif Dinas PUPR sebagai instansi yang peduli terhadap keselamatan pegawai dan masyarakat.
- 4) Menjadi langkah nyata dalam mendukung visi dan misi organisasi menuju pelayanan publik yang aman dan berkualitas.

3. Pemerintah Kabupaten Kerinci

- 1) Mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada keselamatan publik.
- 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kerja aman.
- 3) Mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Berikut merupakan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama aktualisasi,

Tabel 4. 5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

No.	Kegiatan	Output	Durasi dan Waktu	Pihak yang Terlibat	Sumber Biaya	Keterangan
1	Pemeliharaan dan pembaruan peta jalur evakuasi serta prasarana pendukung evakuasi	Peta dan prasarana pendukung selalu dalam kondisi baik	Setiap 6 bulan	Individu Peserta serta staff Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi	Tidak Ada	
2	Pelaksanaan sosialisasi evakuasi bagi pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	Pegawai memahami jalur dan prosedur evakuasi	Setiap 1 tahun	Pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	Tidak Ada	



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi perlu direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Berikut merupakan timeline kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan,

1. Aktualisasi/Habitiasi Mata Pelatihan

Selama masa pelatihan, peserta telah melaksanakan lima kegiatan utama yang menjadi rangkaian aktualisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Rincian hasil aktualisasi tiap kegiatan adalah:

Kegiatan 1: Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor

Penulis memulai kegiatan dengan menyusun surat telaah staf sebagai bentuk tanggung jawab dan **akuntabilitas** atas gagasan yang telah dirancang. Surat tersebut disusun dengan penuh kehati-hatian agar isi dan argumentasi yang tercantum benar-benar sesuai dengan hasil identifikasi isu di lingkungan kerja sebagai bentuk penerapan nilai **kompeten**. Penulis kemudian menemui mentor untuk melakukan konsultasi secara langsung. Dalam proses konsultasi tersebut, penulis menyampaikan ide serta rancangan kegiatan aktualisasi secara terbuka, sekaligus menerima berbagai saran dan masukan dari mentor untuk penyempurnaan isi rancangan dalam menjaga nilai **harmonis**. Penulis mencatat setiap masukan dengan seksama dan secara **adaptif** menyesuaikan kembali draf laporan agar lebih relevan dengan kebutuhan instansi.



Kegiatan 2: Merancang peta jalur evakuasi di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci

Setelah memperoleh persetujuan dari mentor, penulis melanjutkan kegiatan dengan melakukan survei langsung ke lokasi kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengamati tata letak ruangan, pintu keluar, dan area yang berpotensi menjadi jalur evakuasi **berkolaborasi** dengan rekan kerja. Hasil survei kemudian dituangkan dalam bentuk sketsa *layout* sederhana yang dijadikan dasar perancangan peta evakuasi sebagai bentuk penerapan nilai **akuntabel**.

Berdasarkan data, penulis mulai merancang peta jalur evakuasi menggunakan perangkat lunak desain dengan memperhatikan simbol keselamatan, arah panah, titik kumpul, dan pintu darurat sebagai wujud nilai **kompeten**. Dalam tahap ini, nilai **Berorientasi Pelayanan** tampak nyata karena rancangan yang dibuat bertujuan melindungi keselamatan seluruh pegawai dan masyarakat yang berkunjung.

Kegiatan 3: Membuat prasarana pendukung evakuasi bencana di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci

Penulis melanjutkan kegiatan dengan membuat dan menyiapkan prasarana pendukung evakuasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah penulis **berkolaborasi** dengan rekan kerja melakukan survei titik-titik strategis di lingkungan kantor untuk menentukan lokasi pemasangan tanda arah evakuasi, titik kumpul (*assembly point*), dan tanda pintu darurat (*emergency exit*).



Hasil survei kemudian secara **akuntabel** dijadikan dasar dalam menentukan jumlah dan ukuran tanda yang diperlukan. Penulis mengumpulkan contoh desain dari berbagai sumber sebagai referensi, kemudian mulai mendesain tanda-tanda keselamatan tersebut dengan memperhatikan kesesuaian warna, simbol, dan arah sesuai standar K3 dengan mengedepankan **kompetensi**. Dalam pelaksanaannya, penulis menampilkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan menghadirkan sarana yang melindungi keselamatan pegawai dan masyarakat

Kegiatan 4: Melakukan sosialisasi peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi

Setelah seluruh desain peta dan prasarana pendukung evakuasi selesai dibuat, penulis melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pegawai Dinas PUPR sebagai bentuk **akuntabilitas**, khususnya Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi. Sebelum kegiatan berlangsung, penulis **berkolaborasi** dengan rekan kerja dalam menyusun jadwal kegiatan dan menyiapkan bahan sosialisasi.

Pada hari pelaksanaan, penulis mempresentasikan tujuan dan manfaat pembuatan peta jalur evakuasi serta menjelaskan lokasi titik kumpul dan arah evakuasi di kantor sebagai bentuk nilai **berorientasi pelayanan**. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan mengedepankan nilai **harmonis**. Seluruh rangkaian kegiatan terdokumentasi dengan baik melalui foto dan daftar hadir sosialisasi.



Kegiatan 5: Melakukan evaluasi dan konsultasi hasil aktualisasi bersama mentor

Setelah seluruh kegiatan aktualisasi selesai dilaksanakan, penulis kemudian secara **kompeten** menyusun laporan hasil sosialisasi. Kemudian laporan akhir aktualisasi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penerapan nilai **akuntabel**. Penyusunan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, serta catatan dari setiap tahapan kegiatan berkolaborasi dengan rekan kerja sebagai bentuk nilai **kolaboratif**. Setelah laporan disusun, penulis menemui mentor untuk melakukan konsultasi akhir, menyampaikan hasil kegiatan, serta menerima saran dan masukan untuk penyempurnaan laporan sebagai perwujudan nilai **loyal**.

Selama proses konsultasi, mentor memberikan beberapa koreksi dan rekomendasi perbaikan agar laporan lebih komprehensif. Penulis dengan sikap terbuka menindaklanjuti setiap saran tersebut dengan menerapkan nilai **harmonis**. Kemudian penulis secara **adaptif** memperbaiki laporan yang telah disusun.

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Gagasan kreatif yang dikembangkan dalam kegiatan aktualisasi ini adalah “Pembuatan Desain Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi melalui pembuatan *leaflet* dan poster di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.” Gagasan ini diambil untuk menjawab permasalahan belum tersedianya sarana keselamatan dan jalur



evakuasi di lingkungan kantor. Melalui penerapan nilai Akuntabel, Kompeten, dan Berorientasi Pelayanan, kegiatan ini menghasilkan inovasi sederhana namun bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan ASN terhadap kondisi darurat.

3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu

Pelaksanaan aktualisasi menghasilkan peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung keselamatan seperti tanda arah evakuasi, *Emergency Exit*, dan *Assembly Point* di lingkungan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. Hasil ini berdampak langsung terhadap peningkatan rasa aman, kesiapsiagaan pegawai, serta mutu pelayanan publik yang lebih profesional dan berorientasi pada keselamatan. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta mendukung misi Dinas PUPR dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan produktif.

B. Rekomendasi

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Kepada penyelenggara LATSAR, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pembimbingan peserta agar penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dapat lebih kontekstual dengan tugas di instansi masing-masing. Penyelenggara juga diharapkan memperkuat materi inovasi dan digitalisasi pelayanan publik agar peserta mampu menghasilkan gagasan aktualisasi yang lebih adaptif dan berdampak nyata.



2. Untuk Instansi Asal Peserta

Bagi instansi asal peserta, Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, disarankan untuk melanjutkan hasil aktualisasi dengan melakukan pemeliharaan dan pembaruan berkala terhadap peta jalur evakuasi serta sarana pendukung keselamatan. Instansi juga diharapkan melakukan sosialisasi dan simulasi evakuasi secara rutin, serta mendorong ASN untuk terus berinovasi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No. 1	Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	1 - 6 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Tersedianya Draf surat telaah staff
	2. Tersedianya catatan dan dokumentasi hasil konsultasi (notulen/foto)
	3. Tersedianya dokumentasi pengajuan surat
	4. Tersedianya surat telaah staff yang ditandatangani oleh mentor
A. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan 1. Membuat Surat Telaah Staff kepada mentor a. Akuntabel Selama penyusunan surat telaah staf kepada mentor di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, penulis telah bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan telaah dengan melakukan kajian yang cermat, mengumpulkan data pendukung, serta memastikan seluruh isi telaah sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses ini dilakukan secara transparan dan sistematis sehingga rekomendasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu mentor dalam pengambilan keputusan yang tepat. b. Kompeten Dalam proses penyusunan surat telaah staf kepada mentor di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, penulis menerapkan nilai Kompeten dengan menyajikan analisis dan gagasan yang sesuai dengan bidang tugas serta kompetensi yang dimiliki. Setiap rekomendasi dalam telaah staf disusun berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja, sehingga mampu memberikan alternatif solusi yang relevan dan aplikatif. Dengan demikian, telaah staf tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mendukung kualitas pengambilan keputusan oleh mentor. c. Harmonis Dalam penyusunan surat telaah staf kepada mentor di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, penulis juga menerapkan nilai Harmonis dengan menghargai waktu serta menyesuaikan diri dengan jadwal mentor. Hal ini diwujudkan melalui komunikasi yang sopan, koordinasi yang baik, serta penyampaian telaah staf sesuai waktu yang telah disepakati. Penulis berusaha menjaga hubungan kerja yang selaras dengan tetap	



memperhatikan kesibukan dan prioritas mentor, sehingga proses konsultasi maupun tindak lanjut dapat berjalan lancar. Sikap menghargai dan menyesuaikan diri ini mencerminkan upaya membangun lingkungan kerja yang rukun, penuh rasa saling pengertian, serta mendukung terciptanya kolaborasi yang produktif.

2. Melakukan konsultasi rancangan aktualisasi dengan mentor

a. Akuntabel

Dalam kegiatan melakukan konsultasi rancangan aktualisasi dengan mentor di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, penulis menerapkan nilai Akuntabel dengan menyiapkan rancangan secara matang sebelum dikonsultasikan. Setiap bagian dari rancangan didukung oleh data, regulasi, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis memastikan bahwa seluruh isi rancangan jelas, sistematis, dan sesuai dengan tujuan aktualisasi, sehingga memudahkan mentor dalam memberikan masukan. Sikap tanggung jawab ditunjukkan dengan mencatat setiap arahan atau koreksi dari mentor serta menindaklanjutinya secara konsisten. Dengan cara ini, proses konsultasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berfungsi untuk menyempurnakan rancangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kompeten

Dalam kegiatan melakukan konsultasi rancangan aktualisasi dengan mentor di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, penulis menerapkan nilai Kompeten dengan menyampaikan gagasan, analisis, serta alternatif solusi yang sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang dimiliki. Penulis berupaya memahami substansi rancangan secara mendalam sehingga dapat berdiskusi dengan mentor secara argumentatif dan terarah. Selain itu, penulis menunjukkan kesungguhan untuk mengembangkan diri dengan menerima setiap masukan sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, proses konsultasi tidak hanya sekadar meminta persetujuan, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran untuk meningkatkan kualitas rancangan aktualisasi.

c. Harmonis

Dalam kegiatan melakukan konsultasi rancangan aktualisasi dengan mentor di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, penulis menerapkan nilai Harmonis dengan menghargai waktu dan jadwal mentor serta menjaga etika komunikasi selama proses konsultasi berlangsung. Penulis menyesuaikan diri dengan ketersediaan mentor, menyampaikan rancangan dengan bahasa yang sopan, serta terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan. Dengan menjaga sikap saling menghormati, tercipta suasana konsultasi



yang kondusif dan penuh rasa saling pengertian, sehingga proses diskusi dapat berjalan efektif serta memperkuat hubungan kerja yang harmonis.

3. Mengajukan surat telaah staff kepada mentor

a. Akuntabel

Dalam kegiatan mengajukan surat telaah staf kepada mentor di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, penulis menerapkan nilai Akuntabel dengan memastikan bahwa surat telaah yang diajukan telah disusun secara cermat, sesuai format tata naskah dinas. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi telaah, mulai dari analisis masalah, alternatif solusi, hingga rekomendasi yang diberikan. Selain itu, penulis juga memastikan kejelasan dan kebenaran dokumen sebelum diserahkan kepada mentor.

b. Kompeten

Dalam kegiatan mengajukan surat telaah staf kepada mentor di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, penulis menerapkan nilai Kompeten dengan menyusun telaah berdasarkan pemahaman substansi, pengetahuan teknis, serta keterampilan analisis yang dimiliki. Setiap gagasan dan rekomendasi dituangkan secara jelas, logis, dan relevan dengan isu yang dikaji sehingga dapat menjadi masukan yang bernilai bagi mentor.

c. Adaptif

Dalam kegiatan mengajukan surat telaah staf kepada mentor di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, penulis menerapkan nilai Adaptif dengan menyesuaikan isi dan penyajian telaah sesuai arahan serta kebutuhan mentor. Penulis terbuka terhadap perubahan, cepat merespons setiap koreksi atau masukan, serta memperbarui dokumen telaah agar lebih relevan dan tepat sasaran.

B. Teknik Aktualisasi Yang Digunakan dan Bukti Fisik Kegiatan

a. Membuat Surat Telaah Staff kepada mentor



Gambar 1. Menyusun *draft* surat telaah staff



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Sukak, Kode Pos 37162
Pos-el pupr@kerincikab.go.id Website http://pu.kerincikab.go.id

NOTULENSI KONSULTASI

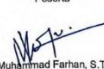
Narasumber : Ir. Frans Melias Pratama, S.T., M.T.
Jabatan : Pengelola Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan
Tanggal :
Tempat : Dinas PUPR Kabupaten Kerinci

No.	Notulensi Konsultasi
	- Perbaiki Surat telaah staff - Perbaiki typo pada laporan rancangan diklatasi

Kerinci, 10 September 2025

Mengotahui
Mentor

Ir. Frans Melias Pratama, S.T., M.T.
NIP. 19820118 201101 1 003

Peserta

Muhammad Farhan, S.T.
NIP. 20020802 202505 1 001

Gambar 4. Notulensi hasil konsultasi

c. Mengajukan surat telaah staff kepada mentor



Gambar 5. Mengajukan surat telaah staff kepada mentor




PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el pupr@kerincikab.go.id Website http://pu.kerincikab.go.id

SURAT TELAHAH STAF

Yth. : Ir. Frans Mellas Pratama, S.T., M.T.
Dari : Muhammad Farhan, S.T.
Tanggal : 10 September 2025
Nomor : 800/894/IX / PUPR - 2025
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Rencana Rancangan Aktualisasi LATSAR CPNS Tahun 2025

I. Persoalan : a. Belum Tersedianya Prasarana Pendukung Evakuasi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
b. Belum Optimalnya Sarana Keselamatan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
c. Belum Tersedianya Peta Jalur Evakuasi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci

II. Kesimpulan : Belum Tersedianya Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi di Lingkungan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

III. Saran : Belum Tersedianya Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi di Lingkungan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

Menyetujui,
Mentor

Peserta LATSAR


Ir. Frans Mellas Pratama, S.T., M.T.
NIP. 19820118 201101 1 003


Muhammad Farhan, S.T.
NIP. 20020802 202505 1 001

Gambar 6. Surat telaah staff yang ditandatangani oleh mentor

C. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

a. Membuat Surat Telaah Staff kepada mentor

Proses pembuatan surat telaah staf kepada mentor dilakukan dengan mengidentifikasi isu yang relevan, mengumpulkan data serta regulasi pendukung, lalu menyusun telaah secara sistematis. Produk akhir yang dihasilkan berupa surat telaah staf dengan isi yang akurat, format sesuai tata naskah dinas, bahasa formal yang komunikatif, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pertimbangan bagi mentor dalam pengambilan keputusan.

b. Melakukan konsultasi rancangan aktualisasi dengan mentor

Proses konsultasi rancangan aktualisasi dengan mentor dilakukan melalui penyampaian draft yang telah dipersiapkan secara sistematis, kemudian didiskusikan bersama untuk mendapatkan masukan dan koreksi. Produk dari kegiatan ini berupa rancangan aktualisasi yang lebih terarah, disesuaikan dengan arahan mentor, serta memiliki kualitas yang lebih baik karena telah diperbaiki berdasarkan masukan sehingga siap digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan aktualisasi.



c. Mengajukan surat telaah staff kepada mentor

Proses pengajuan surat telaah staf kepada mentor dilakukan setelah dokumen disusun dengan cermat, ditinjau ulang, dan dipastikan sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas. Surat kemudian diajukan secara formal kepada mentor untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan. Produk yang dihasilkan berupa surat telaah staf yang resmi, valid, serta dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan karena memuat analisis yang jelas, rekomendasi yang tepat, dan isi yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi

Kegiatan konsultasi rancangan aktualisasi dengan mentor memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, khususnya misi nomor 3 yaitu menciptakan SDM yang berkualitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melalui proses diskusi yang berlangsung, setiap argumen dan pendapat yang disampaikan didasarkan pada kompetensi serta pengalaman masing-masing pihak, sehingga terjadi pertukaran pengetahuan yang konstruktif. Hal ini membuka peluang untuk mempelajari hal-hal baru, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan analisis dan komunikasi pegawai. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara kolektif, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berdaya saing.

E. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

Apabila kegiatan seperti membuat dan mengajukan surat telaah staf kepada mentor maupun melakukan konsultasi rancangan aktualisasi tidak dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, maka hasil kerja yang dihasilkan berpotensi tidak akurat, kurang sistematis, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Proses konsultasi dengan mentor juga kehilangan makna pembelajaran karena argumen dan diskusi tidak didasari kompetensi dan sikap saling menghargai. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kualitas kinerja satuan kerja, melemahkan budaya kerja kolaboratif, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Bagi masyarakat, kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap Dinas PUPR dan melemahkan dukungan mereka terhadap program pembangunan yang dijalankan.



b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		Muhammad Farhan		
Satuan Kerja		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1	3 September 2025	Memperbaiki surat telaah staff	Tersedianya draft final surat telaah staff	
2	5 September 2025	Memperbaiki laporan rancangan aktualisasi	Tersedianya rancangan final aktualisasi	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		Muhammad Farhan		
Satuan Kerja		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor



Lampiran 2. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-2

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No. 2	Merancang peta jalur evakuasi bencana di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	7 - 20 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/<i>Evidence</i>	1. Tersedianya daftar kebutuhan data dan referensi peta evakuasi kantor
	2. Tersedianya sketsa layout lingkungan kantor Dinas PUPR
	3. Tersedianya peta evakuasi kantor Dinas PUPR
A. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan 1. Mengidentifikasi kebutuhan data dan mengumpulkan referensi peta evakuasi bangunan a. Akuntabel Dalam kegiatan mengidentifikasi kebutuhan data dan mengumpulkan referensi peta evakuasi bangunan, penulis menunjukkan sikap akuntabel dengan melaksanakan setiap langkah secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan informasi yang relevan, menyusun daftar data yang diperlukan, serta menelusuri berbagai referensi peta evakuasi dari standar nasional maupun pedoman teknis yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penulis memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi rujukan yang tepat dalam penyusunan peta evakuasi bangunan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. b. Kompeten Penulis juga menerapkan nilai kompeten dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam proses identifikasi kebutuhan data dan pengumpulan referensi peta evakuasi bangunan. Penulis mempelajari berbagai regulasi, standar nasional, serta literatur teknis terkait penyusunan peta evakuasi, kemudian mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam pemilihan data dan sumber yang relevan. Penulis juga menggunakan perangkat lunak untuk menggambar. Dengan mengutamakan ketelitian dan memperbarui kemampuan profesional, penulis mampu menghasilkan rekomendasi referensi yang akurat, relevan, dan mendukung penyusunan peta evakuasi yang efektif dan sesuai standar di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.	



2. Melakukan survey *layout* kantor Dinas PUPR

a. Kompeten

Dalam melaksanakan survei layout kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, penulis menunjukkan nilai kompeten dengan mempersiapkan kegiatan secara baik dan sesuai prosedur. Penulis menggunakan pengetahuan tentang tata ruang dan keselamatan kerja, serta memanfaatkan alat ukur sederhana untuk mendapatkan data yang tepat mengenai letak ruangan, jalur keluar, dan area yang dapat digunakan sebagai jalur evakuasi. Data hasil pengukuran kemudian dicek kembali agar sesuai dengan denah yang ada dan kebutuhan penyusunan peta evakuasi. Dengan ketelitian dan pemahaman yang dimiliki, survei layout menghasilkan informasi yang akurat dan siap digunakan untuk perencanaan jalur evakuasi kantor.

b. Kolaboratif

Dalam melaksanakan survei layout kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, penulis menerapkan nilai kolaboratif dengan membangun kerja sama yang baik bersama rekan kerja. Penulis berdiskusi mengenai area penting yang perlu diperhatikan. Komunikasi yang terbuka dan saling menghargai pendapat memungkinkan proses survei berlangsung lebih efektif dan efisien. Melalui sinergi ini, data layout yang diperoleh menjadi lebih lengkap, akurat, dan siap digunakan sebagai dasar penyusunan peta evakuasi.

3. Membuat peta evakuasi kantor Dinas PUPR dan mengkonsultasikannya kepada mentor

a. Berorientasi Pelayanan

Dalam kegiatan membuat peta evakuasi kantor Dinas PUPR dan mengkonsultasikannya kepada mentor, penulis menerapkan nilai berorientasi pelayanan dengan menyusun peta yang mudah dipahami dan sesuai kebutuhan pengguna kantor. Penulis memperhatikan aspek kejelasan simbol, warna, dan petunjuk arah agar peta dapat membantu pegawai maupun pengunjung memahami jalur evakuasi dengan cepat saat keadaan darurat. Penulis juga mendiskusikan rancangan peta dengan mentor secara terbuka untuk menerima masukan dan memastikan hasil akhir benar-benar bermanfaat bagi semua pihak.

b. Akuntabel

Dalam proses membuat peta evakuasi kantor Dinas PUPR dan mengkonsultasikannya kepada mentor, penulis menunjukkan nilai akuntabel dengan menyusun peta berdasarkan data hasil survei yang valid dan sesuai pedoman keselamatan yang berlaku. Setiap tahapan, mulai dari pengolahan data, penentuan jalur evakuasi, hingga desain akhir peta, dicatat secara rapi dan dapat ditelusuri kembali bila diperlukan. Penulis juga menyampaikan hasil pekerjaan kepada mentor secara jelas dan terbuka.



B. Teknik Aktualisasi Yang Digunakan dan Bukti Fisik Kegiatan

a. Mengidentifikasi kebutuhan data dan mengumpulkan referensi peta evakuasi bangunan

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siliak, Kode Pos 37162
Pos-el: pu@kerincikab.go.id Website: http://pu.kerincikab.go.id

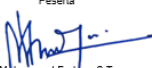
DAFTAR KEBUTUHAN DATA

No.	Kebutuhan Data
1.	Sketsa layout denah kantor Dinas PUPR
2.	Nama ruangan kantor Dinas PUPR
3.	Fungsi ruangan kantor Dinas PUPR

No.	Kebutuhan Alat
1.	Peralatan survey: • Pensil • Pulpen • Penggaris • Meteran • Kertas A4 • Kamera dengan resolusi HD

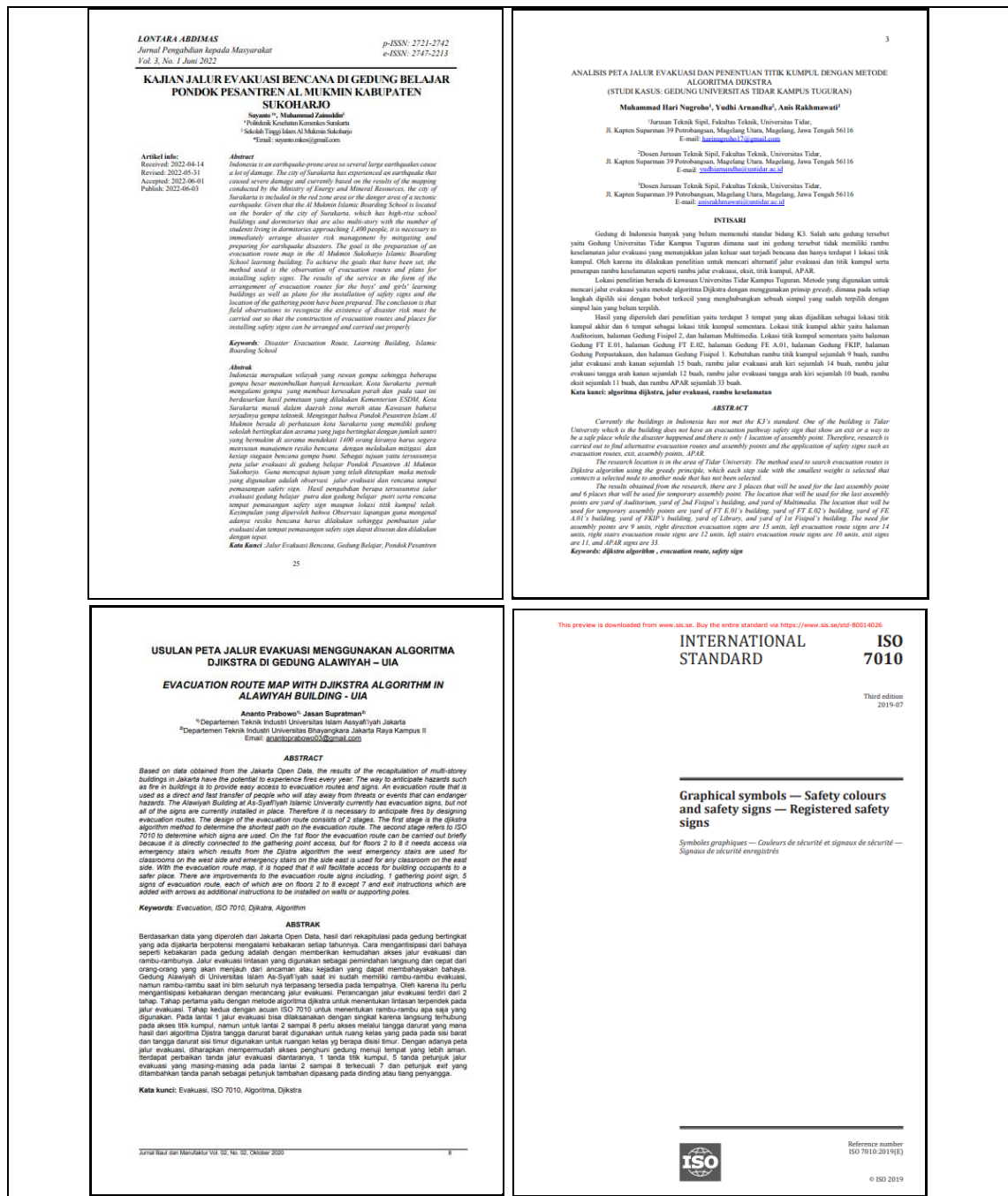
Kerinci, 11 September 2025

Peserta


Muhammad Farhan, S.T.
NIP. 20020802 202505 1 001

Gambar 3. Daftar kebutuhan data







Kembali

SNI 03-6574-2001

Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda arah dan Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan Gedung.

1 Ruang Lingkup.

1.1 Standar pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada bangunan gedung ini dimaksudkan sebagai standar minimal bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan gedung.

1.2 Dengan mengikuti standar ini diharapkan diperoleh bangunan gedung yang memenuhi syarat keamanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk bangunan.

2 Acuan

- NFPA 101, Life Safety Code, 1997 edition, National Fire Protection Association.

3 Istilah dan Definisi.

3.1 lampu darurat (emergency luminaire).

sebuah lampu yang di rancang untuk digunakan pada sistem pencahayaan darurat.

Catatan :

- Sebuah tanda arah "Eksit", dapat juga berfungsi sebagai sebuah lampu darurat apabila telah disesain untuk tujuan itu.
- Lampu darurat dapat dikombinasikan dengan lampu pencahayaan normal atau dapat juga sebagai unit lengkap yang terpisah.

3.2 lux

nilai tingkat pencahayaan dari suatu sumber cahaya terhadap bidang kerja .

3.3 pencahayaan darurat (emergency lighting).

suatu pencahayaan yang mempunyai pasokan daya cadangan.

3.4 perangkat pengusut suara.

peralatan komunikasi satu arah yang digunakan petugas kendali keadaan bahaya dalam upaya mengendalikan evakuasi/penyelamatan penghuni.

3.5 ruang pusat kendali keadaan bahaya.

ruang dimana dipasang perangkat pengusut suara (seperti amplifier, zone selector switch, dan lain-lain), dan sistem komunikasi internal. Biasanya dipilih ruang di lantai dasar.

1 dari 22

Kembali

SNI 03-1746-2000

Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

1. Ruang lingkup.

1.1. Standar ini ditujukan untuk keselamatan jiwa dari bahaya kebakaran. Ketentuan-ketentuannya juga akan membantu keselamatan jiwa dari keadaan darurat yang serupa.

1.2. Standar ini mencakup aspek : konstruksi, proteksi dan penghunian, untuk meminimalkan bahaya kebakaran terhadap jiwa, termasuk asap, gas dan kepaparan.

1.3. Standar ini menetapkan kriteria minimal untuk perencanaan fasilitas jalan keluar yang aman, sehingga memungkinkan penghuni menyelamatkan diri dengan cepat dari dalam bangunan, atau bila dikehendaki ke dalam daerah aman di dalam bangunan.

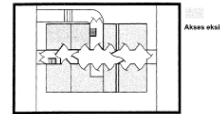
2. Acuan.

a). NFPA 101 : Life Safety Code, 1997 Edition, National Fire Protection Association.

3. Istilah dan definisi.

3.1. akses eksit.

bagian dari sarana jalan ke luar yang menuju ke sebuah eksit.



Gambar 3.1 : Akses eksit.

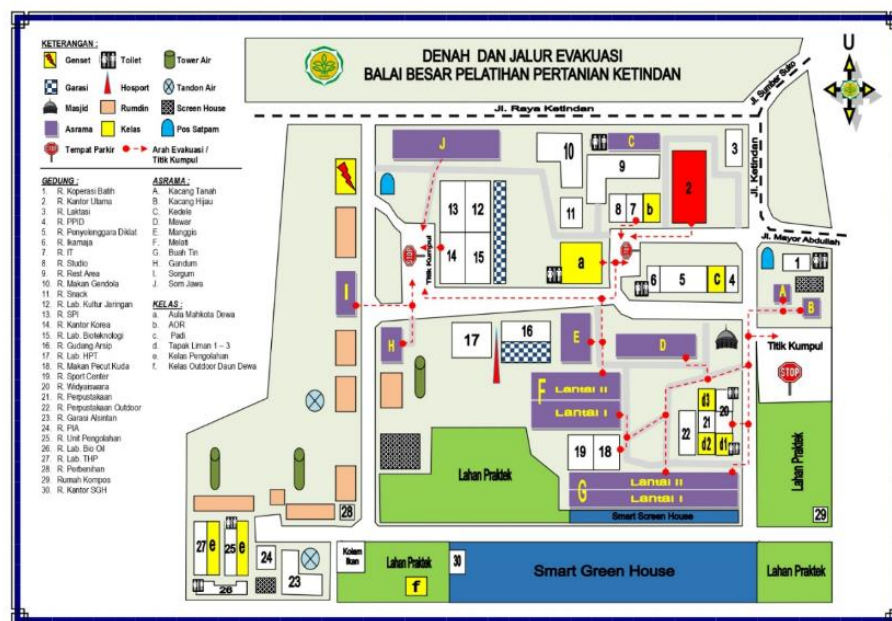
3.2. cacat mobilitas yang serius.

ketidakmampuan untuk bergerak ke arah tangga tetapi tidak dapat menggunakan tangga.

3.3. daerah tempat berlindung (lihat butir 5.12).

Suatu daerah tempat berlindung, adalah salah satu dari :

1 dari 77





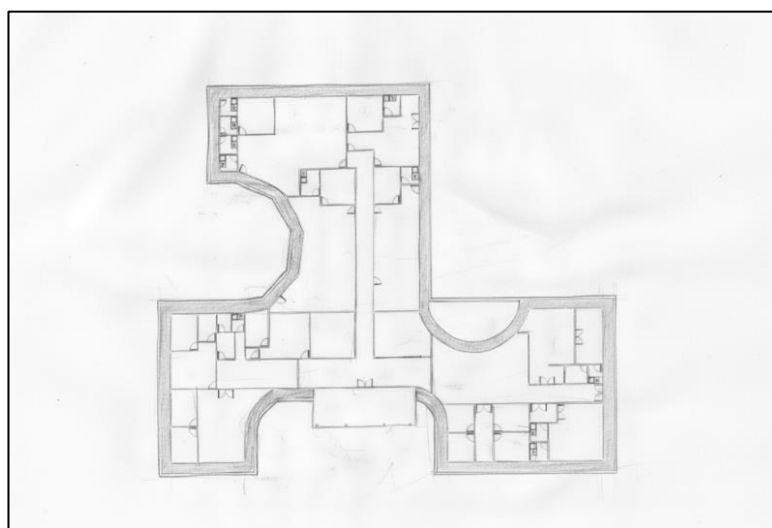
Gambar 4. Referensi peta jalur evakuasi

b. Melakukan survey *layout* kantor Dinas PUPR





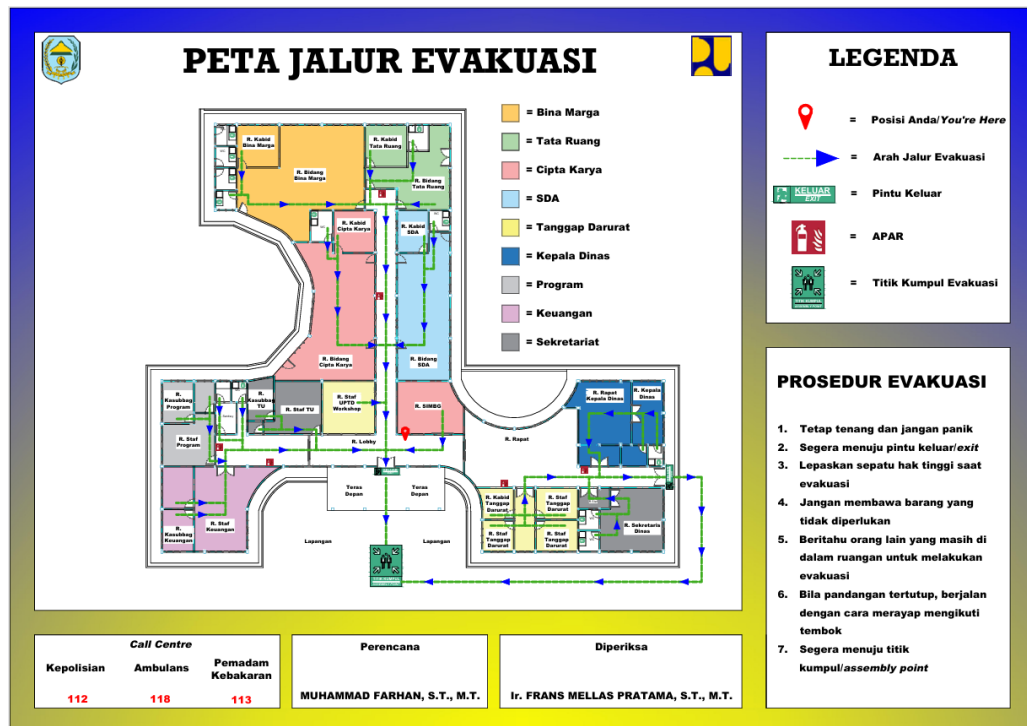
Gambar 3. Survey *layout* Dinas PUPR



Gambar 4. Sketsa *layout* Dinas PUPR



c. Membuat peta evakuasi kantor Dinas PUPR dan mengkonsultasikannya kepada mentor



Gambar 5. Desain peta evakuasi Dinas PUPR



Gambar 6. Konsultasi desain peta dengan mentor



C. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

a. Mengidentifikasi kebutuhan data dan mengumpulkan referensi peta evakuasi bangunan

Proses identifikasi kebutuhan data dan pengumpulan referensi peta evakuasi bangunan dilakukan dengan menyusun daftar data yang diperlukan, seperti denah ruangan, lokasi pintu darurat, jalur keluar, dan titik kumpul, kemudian menelusuri berbagai referensi dari standar nasional, pedoman teknis, serta contoh peta evakuasi yang relevan. Seluruh informasi dicatat secara sistematis agar mudah dianalisis dan disesuaikan dengan kondisi kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. Produk akhir yang dihasilkan berupa daftar kebutuhan data yang jelas dan lengkap, serta kumpulan referensi peta evakuasi yang valid, relevan, dan dapat dijadikan dasar yang andal dalam penyusunan peta evakuasi yang aman dan sesuai ketentuan.

b. Melakukan survey layout kantor Dinas PUPR

Proses survei layout kantor Dinas PUPR dilakukan dengan menyiapkan peralatan ukur sederhana, mencermati denah awal bangunan, lalu mengukur secara langsung tata letak ruangan, akses keluar, serta area yang berpotensi menjadi jalur evakuasi. Setiap hasil pengamatan dan pengukuran dicatat secara rapi serta dibandingkan dengan denah yang tersedia untuk memastikan keakuratan data. Produk akhir yang dihasilkan berupa data layout kantor yang lengkap dan terverifikasi, dilengkapi catatan posisi jalur evakuasi, pintu darurat, dan titik kumpul, sehingga dapat menjadi dasar yang akurat dalam penyusunan peta evakuasi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

c. Membuat peta evakuasi kantor Dinas PUPR dan mengkonsultasikannya kepada mentor

Proses pembuatan peta evakuasi kantor Dinas PUPR dilakukan dengan mengolah data hasil survei layout, menentukan jalur evakuasi yang paling aman, lalu merancang peta menggunakan perangkat lunak desain sederhana. Peta dirancang dengan memperhatikan kejelasan simbol, warna, dan arah evakuasi agar mudah dipahami oleh pegawai maupun pengunjung. Setelah rancangan selesai, penulis mengkonsultasikan hasilnya kepada mentor untuk mendapatkan masukan dan melakukan perbaikan sesuai arahan. Produk akhir yang dihasilkan berupa peta evakuasi kantor Dinas PUPR yang jelas, rapi, dan sesuai dengan standar keselamatan, serta siap digunakan sebagai panduan dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna kantor.



D. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi

Kegiatan ini sejalan dengan misi Dinas PUPR pada poin 3 dan 5, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta melaksanakan program infrastruktur yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui rangkaian tahapan penyusunan peta evakuasi, mulai dari proses belajar, penelusuran referensi, pengumpulan data, hingga pelaksanaan survei lapangan, pegawai memperoleh kesempatan untuk memperluas pengetahuan, mengasah keterampilan teknis, dan memperkuat kemampuan analisis. Selain itu, produk yang dihasilkan berupa rancangan peta evakuasi yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai standar keselamatan, memberikan dukungan nyata terhadap terciptanya pelayanan publik yang lebih aman, nyaman, dan responsif bagi masyarakat yang datang ke kantor Dinas PUPR untuk memperoleh layanan.

E. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

Apabila pelaksanaan kegiatan pembuatan peta evakuasi kantor Dinas PUPR tidak berlandaskan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK, maka kualitas hasil dan manfaatnya berpotensi menurun. Bagi satuan kerja, ketiadaan penerapan nilai seperti Akuntabel, Kompeten, dan Berorientasi Pelayanan dapat menyebabkan proses perencanaan menjadi kurang terarah, data yang digunakan tidak valid, serta desain peta yang dihasilkan tidak sesuai standar keselamatan. Kondisi tersebut akan menimbulkan risiko kesalahan informasi dan menurunkan kredibilitas organisasi dalam menyediakan sarana penunjang keselamatan kerja. Sementara itu, bagi masyarakat yang datang untuk memperoleh layanan, peta evakuasi yang tidak akurat atau sulit dipahami dapat mengurangi rasa aman saat berada di lingkungan kantor, bahkan berpotensi menghambat evakuasi ketika terjadi keadaan darurat. Dengan demikian, penerapan NDS dalam setiap tahap pembuatan peta evakuasi sangat penting untuk menjamin mutu produk, memperkuat profesionalisme pegawai, serta memberikan perlindungan dan pelayanan yang optimal kepada pengguna layanan di kantor Dinas PUPR.



b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		Muhammad Farhan		
Satuan Kerja		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1	18 September 2025	Memperbaiki desain peta jalur evakuasi	Tersedianya desain peta jalur evakuasi yang lebih lengkap	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		Muhammad Farhan		
Satuan Kerja		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor



Lampiran 3. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3 & 4

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No. 3	Membuat prasarana pendukung evakuasi bencana di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	21 September – 4 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/<i>Evidence</i>	1. Tersedianya referensi contoh prasarana pendukung evakuasi
	2. Tersedianya daftar titik dan jumlah kebutuhan prasarana pendukung evakuasi
	3. Tersedianya tanda <i>Emergency Exit, Assembly Point</i> , serta petunjuk arah jalur Evakuasi.
A. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan 1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan referensi contoh prasarana pendukung evakuasi a. Akuntabel Dalam kegiatan mengidentifikasi dan mengumpulkan referensi contoh prasarana pendukung evakuasi, penulis menunjukkan nilai akuntabel dengan melaksanakan setiap langkah secara teliti dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menyusun daftar jenis prasarana yang dibutuhkan. Seluruh data dan sumber informasi dicatat secara rapi, lengkap dengan keterangan. Dengan cara ini, referensi yang dihimpun dapat menjadi acuan yang valid dalam menentukan prasarana pendukung evakuasi yang aman dan sesuai standar di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. b. Kompeten Dalam kegiatan mengidentifikasi dan mengumpulkan referensi contoh prasarana pendukung evakuasi, penulis menerapkan nilai kompeten dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk memperoleh hasil yang tepat dan bermanfaat. Penulis mempelajari standar keselamatan, pedoman teknis, serta literatur yang relevan mengenai prasarana pendukung evakuasi, kemudian memilih referensi yang sesuai dengan kondisi kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. Penulis juga menelaah kualitas dan kesesuaian setiap contoh prasarana agar dapat memberikan rekomendasi yang akurat. Dengan ketelitian dan kemampuan yang terus diasah, hasil identifikasi menjadi lebih lengkap dan dapat mendukung penyusunan rencana prasarana evakuasi yang efektif dan sesuai standar keselamatan.	



2. Melakukan survey dan identifikasi titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi

a. Kompeten

Dalam melaksanakan survei dan identifikasi titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi, penulis menunjukkan nilai kompeten dengan mempersiapkan kegiatan secara matang dan menggunakan pengetahuan teknis yang relevan. Penulis menelaah kembali standar keselamatan dan pedoman pemasangan prasarana, kemudian melakukan pengamatan langsung terhadap area kantor untuk menentukan lokasi yang paling strategis bagi rambu evakuasi dan serta titik kumpul. Seluruh data hasil pengamatan dicatat dengan teliti dan dibandingkan dengan denah bangunan agar sesuai dengan kebutuhan keselamatan. Dengan ketelitian dan pemahaman yang dimiliki, hasil survei menghasilkan rekomendasi titik pemasangan yang akurat, efektif, dan mendukung terciptanya jalur evakuasi yang aman di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

b. Kolaboratif

Dalam melaksanakan survei dan identifikasi titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi, penulis mengutamakan nilai kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak yang memahami kondisi lapangan. Penulis berdiskusi dengan pegawai dan staf lain untuk meminta masukan. Melalui kerja sama yang baik dan komunikasi yang terbuka, proses survei berjalan lebih efektif, dan titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi yang dihasilkan menjadi lebih tepat, aman, dan mendukung kelancaran evakuasi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

c. Harmonis

Dalam kegiatan melakukan survei dan identifikasi titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi, penulis menunjukkan nilai harmonis dengan membangun komunikasi yang baik dan menghargai pendapat seluruh pihak yang terlibat. Penulis berkoordinasi dengan rekan kerja dan pihak terkait di lokasi untuk menentukan titik pemasangan yang strategis tanpa mengganggu aktivitas kerja maupun estetika lingkungan kantor. Proses survei dilakukan secara terbuka dan saling menghormati agar tercipta suasana kerja yang nyaman dan produktif. Dengan penerapan nilai harmonis ini, kegiatan dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai lokasi pemasangan prasarana evakuasi yang efektif di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.



d. Adaptif

Dalam kegiatan melakukan survei dan identifikasi titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi, penulis menunjukkan nilai adaptif dengan menyesuaikan pelaksanaan survei terhadap kondisi lapangan yang berbeda-beda. Penulis menyesuaikan rencana titik pemasangan berdasarkan tata letak bangunan, akses jalur evakuasi, serta kendala yang ditemui di lokasi. Dengan penerapan nilai adaptif ini, survei dapat berjalan fleksibel dan menghasilkan data yang akurat sesuai kondisi nyata di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

3. Membuat prasarana pendukung evakuasi berupa tanda *Emergency Exit, Assembly Point*, serta petunjuk arah jalur Evakuasi dan mengkonsultasikannya kepada mentor.

a. Berorientasi Pelayanan

Dalam kegiatan membuat prasarana pendukung evakuasi berupa tanda *Emergency Exit, Assembly Point*, serta petunjuk arah jalur evakuasi dan mengkonsultasikannya kepada mentor, penulis menerapkan nilai berorientasi pelayanan dengan memastikan setiap rancangan tanda dirancang agar mudah dipahami dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna kantor. Penulis memilih desain, simbol, dan warna yang jelas sesuai standar keselamatan, sehingga memudahkan pegawai maupun pengunjung mengenali arah evakuasi dan lokasi aman saat keadaan darurat. Selain itu, penulis mendiskusikan hasil rancangan bersama mentor untuk memperoleh masukan, memastikan kelayakan, serta menyesuaikan desain dengan kebutuhan lapangan.

b. Akuntabel

Dalam proses membuat prasarana pendukung evakuasi berupa tanda *Emergency Exit, Assembly Point*, serta petunjuk arah jalur evakuasi dan mengkonsultasikannya kepada mentor, penulis menunjukkan nilai akuntabel dengan memastikan setiap langkah kerja dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menyusun rancangan tanda berdasarkan hasil survei lapangan, standar keselamatan yang berlaku, serta referensi resmi, kemudian mendokumentasikan seluruh proses mulai dari pemilihan desain, penentuan ukuran, hingga penempatan yang sesuai dengan kondisi kantor. Hasil rancangan disampaikan kepada mentor beserta penjelasan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan, sehingga produk yang dihasilkan memiliki landasan yang jelas, memenuhi ketentuan keselamatan, dan dapat dijadikan acuan yang kredibel untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.



c. Kompeten

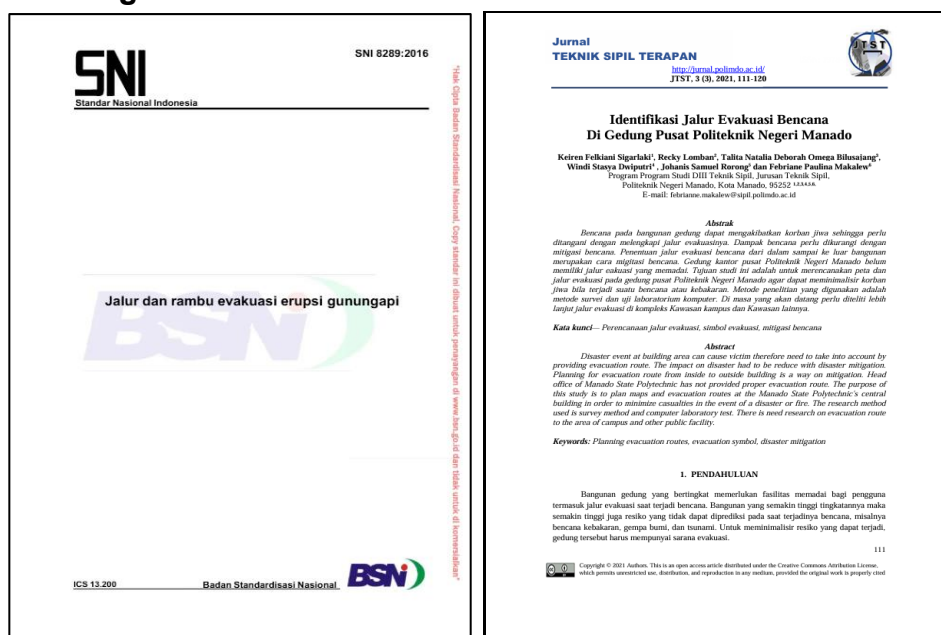
Dalam kegiatan membuat prasarana pendukung evakuasi berupa tanda *Emergency Exit*, *Assembly Point*, dan petunjuk arah jalur evakuasi, penulis menunjukkan nilai kompeten dengan menerapkan pengetahuan teknis serta ketelitian dalam perancangan dan pembuatan media keselamatan. Penulis menyesuaikan desain dengan pedoman keselamatan yang berlaku dan memastikan desain prasarana pendukung mudah dibaca. Hasil rancangan kemudian dikonsultasikan kepada mentor untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan. Dengan penerapan nilai kompeten ini, prasarana yang dihasilkan menjadi efektif, informatif, dan mendukung peningkatan keselamatan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

d. Harmonis

Dalam kegiatan membuat prasarana pendukung evakuasi berupa tanda *Emergency Exit*, *Assembly Point*, dan petunjuk arah jalur evakuasi, penulis menunjukkan nilai harmonis dengan menjalin komunikasi yang baik dan saling menghargai pendapat pihak terkait. Penulis berkoordinasi dengan rekan kerja dan mentor untuk memastikan desain serta penempatan tanda sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan bersama. Proses konsultasi dilakukan dengan terbuka agar tercapai kesepahaman dan hasil yang optimal. Dengan penerapan nilai harmonis ini, kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan prasarana yang tidak hanya fungsional, tetapi juga disepakati bersama di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

B. Teknik Aktualisasi Yang Digunakan dan Bukti Fisik Kegiatan

a. Mengidentifikasi dan mengumpulkan referensi contoh prasarana pendukung evakuasi





KAJIAN JALUR EVAKUASI BENCANA DI GEDUNG BELAJAR PONDOK PESANTREN AL MUKMIN KABUPATEN SUKOHARJO

Syaiful*, Muhammad Zamkudir¹
¹Fakultas Keahlihan Kependidikan Sarawak
²Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Sukoharjo
³Email: syaiful.rieh@gmail.com

Artikel inde:
Received: 2022-04-14
Revised: 2022-05-31
Accepted: 2022-06-01
Published: 2022-06-01

Abstract
Indonesia is an earthquake-prone area in several large earthquakes cause a lot of damage. The city of Sarawak has experienced an earthquake that caused severe damage and currently based on the results of the mapping conducted by the Ministry of Energy and Mineral Resources, the city of Sarawak is included in the red zone area or the danger area of a seismic earthquake. Given that the Al Mukmin Islamic Boarding School is located on the border of the city of Sarawak, which has high-rise school buildings and dormitories that are also multi-story with the number of students living in dormitories approaching 1,000 people, it is necessary to immediately arrange disaster risk management by mitigating and preparing for earthquake disasters. The goal is the preparation of an evacuation route map in the Al Mukmin Islamic Boarding School learning building. To achieve the goals that have been set, the method used is the observation of evacuation routes and plans for installing safety signs. The results of the service in the form of the arrangement of evacuation routes for the boys' and girls' learning buildings as well as plans for the installation of safety signs and the location of the gathering point have been prepared. The conclusion is that field observations to recognize the existence of disaster risk must be carried out so that the construction of evacuation routes and places for installing safety signs can be arranged and carried out properly.

Keywords: Disaster Evacuation Route, Learning Building, Islamic Boarding School

Abstrak
Indonesia merupakan wilayah yang rentan gempa sehingga beberapa gempa besar menimbulkan banyak kerusakan. Kota Sarawak pernah mengalami gempa yang membuat kerusakan parah dan pada saat ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Kementerian ESDM, Kota Sarawak masuk dalam daerah zona merah atau Kawasan Bahaya Wilayah gempa tektonik. Mengingat bahwa Pondok Pesantren Islam Al Mukmin berada di perbatasan kota Sarawak yang memiliki gedung sekolah bertingkat dan asrama yang juga bertingkat dengan jumlah siswa yang berjumlah di atas seribu orang, maka perlu dilakukan manajemen risiko bencana dengan melakukan mitigasi dan kesiap siagaan bencana gempa bumi. Sebagai tujuan yaitu tersusunnya peta jalur evakuasi di gedung belajar Pondok Pesantren Al Mukmin Sukoharjo. Tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka metode yang digunakan adalah observasi jalur evakuasi dan rencana tempat pemasangan safety sign. Hasil penelitian berupa tersusunnya jalur evakuasi gedung belajar putra dan gedung belajar putri serta rencana tempat pemasangan safety sign masing-masing titik tempat tidur. Kesimpulan yang diperoleh bahwa Observasi lapangan guna mengetahui adanya resiko bencana harus dilakukan sehingga pembuatan jalur evakuasi dan tempat pemasangan safety sign dapat disusun dan dilaksanakan dengan tepat.

Kata Kunci: Jalur Evakuasi Bencana, Gedung Belajar, Pondok Pesantren

25

USULAN PETA JALUR EVAKUASI MENGGUNAKAN ALGORITMA DIJKSTRA DI GEDUNG ALAWIYAH – UIA

EVACUATION ROUTE MAP WITH DIJKSTRA ALGORITHM IN ALAWIYAH BUILDING - UIA

Ananto Prabowo¹, Jason Supratman²

¹Departemen Teknik Industri Universitas Islam Asyafiyah Jakarta
²Departemen Teknik Industri Universitas Bhegyangkara Jakarta Raya Kampus II
Email: anantoprabowo1@gmail.com

ABSTRACT

Based on data obtained from the Jakarta Open Data, the results of the recapitulation of multi-story buildings in Jakarta have the potential to experience fires every year. The way to anticipate hazards such as fire in buildings is to provide easy access to evacuation routes and signs. An evacuation route that is used as a direct and fast transfer of people who will stay away from threats or events that can endanger hazards. The Alawiyah Building at Al-Syafiyah Islamic University currently has evacuation signs, but not all of the signs are currently installed in place. Therefore it is necessary to anticipate fires by designing evacuation routes. The design of the evacuation route consists of 2 stages. The first stage is the dijkstra algorithm method to determine the shortest path on the evacuation route. The second stage refers to ISO 7010 to determine which signs are used. On the 1st floor the evacuation route can be carried out briefly because it is directly connected to the gathering point access, but for floors 2 to 8 it needs access via emergency stairs which results from the Dijkstra algorithm the west emergency stairs are used for classrooms on the west side and emergency stairs on the east side is used for any classroom on the east side. With the evacuation route map, it is hoped that it will facilitate access for building occupants to a safer place. There are improvements to the evacuation route signs including: 1 gathering point sign, 5 signs of evacuation route, each of which are on floors 2 to 8 except 7 and exit instructions which are added with arrows as additional instructions to be installed on walls or supporting poles.

Keywords: Evacuation, ISO 7010, Dijkstra, Algorithm

ABSTRAK

Berdasarkan data yang diperoleh dari Jakarta Open Data, hasil dari rekapsulasi pada gedung bertingkat yang ada di Jakarta berpotensi mengalami kebakaran setiap tahunnya. Cara mengantisipasi dari bahaya seperti kebakaran pada gedung adalah dengan memberikan kemudahan akses jalur evakuasi dan rambu-rambu. Jalur evakuasi lintasan yang digunakan sebagai pemindahan langsung dan cepat dari orang-orang yang akan menjadi dari ancaman atau kejadian yang dapat membahayakan bahaya. Gedung Alawiyah di Universitas Islam As-Syafiyah saat ini sudah memiliki rambu-rambu evakuasi, namun rambu-rambu saat ini belum seluruhnya terpasang tempatnya. Oleh karena itu perlu mengantisipasi kebakaran dengan merancang jalur evakuasi. Perancangan jalur evakuasi terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama yaitu dengan metode algoritma dijkstra untuk menentukan lintasan terpendek pada jalur evakuasi. Tahap kedua dengan acuan ISO 7010 untuk menentukan rambu-rambu apa saja yang digunakan. Pada lantai 1 jalur evakuasi bisa dilaksanakan dengan singkat karena langsung terhubung pada akses titik kumpul, namun untuk lantai 2 sampai 8 perlu akses melalui tangga darurat yang mana hasil dari algoritma Dijkstra tangga darurat barat digunakan untuk ruang kelas yang pada pada sisi barat dan tangga darurat sisi timur digunakan untuk ruangan kelas yg berada di sisi timur. Dengan adanya peta jalur evakuasi, diharapkan mempermudah akses penghuni gedung menuju tempat yang lebih aman. Terdapat perbaikan tanda jalur evakuasi diantaranya: 1 tanda titik kumpul, 5 tanda petunjuk jalur evakuasi yang masing-masing ada pada lantai 2 sampai 8 terkecuali 7 dan petunjuk exit yang ditambahkan tanda panah sebagai petunjuk lambaian dipasang pada dinding atau tiang penyangga.

Kata kunci: Evakuasi, ISO 7010, Algoritma, Dijkstra

ANALISIS PETA JALUR EVAKUASI DAN PENENTUAN TITIK KUMPUL DENGAN METODE ALGORITMA DIKSTRA

(STUDI KASUS: GEDUNG UNIVERSITAS TIDAR KAMPUS TUGURAN)

Muhammad Hari Nugroho¹, Yudi Arandha², Anis Rahmawati³

¹Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tidar,
Jl. Kapten Suparman 39 Pombobungan, Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah 56116
E-mail: harnugroho17@gmail.com

²Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tidar,
Jl. Kapten Suparman 39 Pombobungan, Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah 56116
E-mail: yudi@uistidar.ac.id

³Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tidar,
Jl. Kapten Suparman 39 Pombobungan, Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah 56116
E-mail: anisrahmawati@uistidar.ac.id

INTISARI

Gedung di Indonesia banyak yang belum memenuhi standar bidang K3. Salah satu gedung tersebut yaitu Gedung Universitas Tidar Kampus Tuguran dimana saat ini gedung tersebut tidak memiliki rambu keselamatan jalur evakuasi yang menunjukkan jalur keluar saat terjadi bencana dan hanya terdapat 1 lokasi titik kumpul. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mencari alternatif jalur evakuasi dan titik kumpul serta penempatan rambu keselamatan seperti rambu jalur evakuasi, exit, titik kumpul, APAR.

Lokasi penelitian berada di kawasan Universitas Tidar Kampus Tuguran. Metode yang digunakan untuk mencari jalur evakuasi yaitu metode algoritma Dijkstra dengan menggunakan prinsip greedy, dimana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil yang menghasilkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih.

Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu terdapat 3 tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi titik kumpul akhir dan 6 tempat sebagai lokasi titik kumpul sementara. Lokasi titik kumpul akhir yaitu halaman Auditorium, halaman Gedung Fisipol 2, dan halaman Matematika. Lokasi titik kumpul sementara yaitu halaman Gedung FT E-01, halaman Gedung FT E-01, halaman Gedung FT E-01, halaman Gedung FKIP, halaman Gedung Perputakaan, dan halaman Gedung Fisipol 1. Kebutuhan rambu titik kumpul sejumlah 9 buah, rambu jalur evakuasi arah kanan sejumlah 15 buah, rambu jalur evakuasi arah kiri sejumlah 14 buah, rambu jalur evakuasi tangga arah kanan sejumlah 12 buah, rambu jalur evakuasi tangga arah kiri sejumlah 10 buah, rambu exit sejumlah 11 buah, dan rambu APAR sejumlah 31 buah.

Kata kunci: algoritma dijkstra, jalur evakuasi, rambu keselamatan

ABSTRACT

Currently the buildings in Indonesia has not met the K3's standard. One of the building is Tidar University which is the building does not have an evacuation pathway safety signs that show an exit or a way to be a safe place while the disaster happened and there is only 1 location of assembly point. Therefore, research is carried out to find alternative evacuation routes and assembly points and the application of safety signs such as evacuation routes, exit, assembly points, APAR.

The research location is in the area of Tidar University. The method used to search evacuation routes is Dijkstra algorithm using the greedy principle, which each step side with the smallest weight is selected that connects a selected node to another node that has not been selected.

The results obtained from the research, there are 3 places that will be used for the last assembly point and 6 places that will be used for temporary assembly point. The location that will be used for the last assembly points are yard of Auditorium, yard of Fisipol 2 building, and yard of Mathematics. The location that will be used for temporary assembly points are yard of FT E-01's building, yard of FT E-01's building, yard of FT E-01's building, yard of FKIP's building, and yard of Perputakaan's building. The need for assembly points are 9 units, right direction evacuation signs are 15 units, left evacuation route signs are 14 units, right stairs evacuation route signs are 12 units, left stairs evacuation route signs are 10 units, exit signs are 11, and APAR signs are 31.

Keywords: dijkstra algorithm , evacuation route, safety sign



Kembali

SNI 03-6574-2001

Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda arah dan Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan Gedung.

1 Ruang Lingkup.

1.1 Standar pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada bangunan gedung ini dimaksudkan sebagai standar minimal bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan gedung.

1.2 Dengan mengikuti standar ini diharapkan diperoleh bangunan gedung yang memenuhi syarat keamanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk bangunan.

2 Acuan

- NFPA 101, Life Safety Code, 1997 edition, National Fire Protection Association.

3 Istilah dan Definisi.

3.1 lampu darurat (emergency luminaire).

sebuah lampu yang di rancang untuk digunakan pada sistem pencahayaan darurat.

Catatan :

a). Sebuah tanda arah "Ekst", dapat juga berfungsi sebagai sebuah lampu darurat apabila telah didesain untuk tujuan itu.
b). Lampu darurat dapat dikombinasikan dengan lampu pencahayaan normal atau dapat juga sebagai unit lengkap yang terpisah.

3.2 lux

nilai tingkat pencahayaan dari suatu sumber cahaya terhadap bidang kerja .

3.3 pencahayaan darurat (emergency lighting).

suatu pencahayaan yang mempunyai pasokan daya cadangan.

3.4 perangkat pengusut suara.

peralatan komunikasi satu arah yang digunakan petugas kendali keadaan bahaya dalam upaya mengendalikan evakuasi/penyelamatan penghuni.

3.5

ruang pusat kendali keadaan bahaya.

ruang dimana dipasang perangkat pengusut suara (seperti amplifier, zone selector switch, dan lain-lain), dan sistem komunikasi internal. Biasanya dipisahkan ruang di lantai dasar.

1 dari 22

Kembali

SNI 03-1746-2000

Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

1. Ruang lingkup.

1.1. Standar ini ditujukan untuk keselamatan jiwa dari bahaya kebakaran. Ketentuan-ketentuannya juga akan membantu keselamatan jiwa dari keadaan darurat yang serupa.

1.2. Standar ini mencakup aspek : konstruksi, proteksi dan penghunian, untuk meminimalkan bahaya kebakaran terhadap jiwa, termasuk asap, gas dan kepakanan.

1.3. Standar ini menetapkan kriteria minimal untuk perancangan fasilitas jalan keluar yang aman, sehingga memungkinkan penghuni menyelamatkan diri dengan cepat dari dalam bangunan, atau bila dikehendaki ke dalam daerah aman di dalam bangunan.

2. Acuan.

a). NFPA 101 : Life Safety Code, 1997 Edition, National Fire Protection Association.

3. Istilah dan definisi.

3.1.

akses eksit.

bagian dari sarana jalan ke luar yang menuju ke sebuah eksit.

Gambar 3.1 : Akses eksit.

3.2.

cacat mobilitas yang serius.

kemampuan untuk bergerak ke arah tangga tetapi tidak dapat menggunakan tangga.

3.3.

daerah tempat berlindung (lihat butir 5.12).

Suatu daerah tempat berlindung, adalah salah satu dari :

1 dari 77

Table 2 — Summary of all safety signs

	Category				
	E	F	M	P	W
	Evacuation route, location of safety equipment or safety facility, safety action (safe condition signs)	Fire equipment signs	Mandatory action signs	Prohibition signs	Warning signs
Safety sign					
Reference number	E001	F001	M001	P001	W001
Referent	Emergency exit (left hand)	Fire extinguisher	General mandatory action sign	General prohibition sign	General warning sign
Safety sign					
Reference number	E002	F002	M002	P002	W002
Referent	Emergency exit (right hand)	Fire hose reel	Refer to instruction manual/booklet	No smoking	Warning; Explosive material



Table 2 (continued)					
	Category				
	E	F	M	P	W
	Evacuation route, location of safety equipment or safety facility, safety action (safe condition signs)	Fire equipment signs	Mandatory action signs	Prohibition signs	Warning signs
Safety sign					
Reference number	E007	F007	M007	P007	W007
Referent	Evacuation assembly point	Fire protection door	Opaque eye protection must be worn	No access for people with active implanted cardiac devices	Warning; Floor-level obstacle

Gambar 1. Referensi peta jalur evakuasi

b. Melakukan survey dan identifikasi titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi



Gambar 2. Survey titik pemasangan prasarana pendukung



Gambar 3. Melakukan diskusi dengan rekan kerja


PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Bukit, Kode Pos 37162
 Email: puarp@kerincikab.go.id Website: http://pu.kerincikab.go.id

DAFTAR KEBUTUHAN PRASARANA PENDUKUNG EVAKUASI

No	Jenis	Titik Pemasangan	Jumlah
1.	Petunjuk arah jalur evakuasi	Koridor utama	8
		Ruang Kepala Dinas	1
		Ruang Sekretaris	1
		Ruang Bina Marga	1
		Ruang Tata Ruang	1
		Ruang Cipta Karya	1
		Ruang SDA	1
		Ruang Tanggap Darurat	1
		Ruang Keuangan	1
		Ruang Program	1
2.	Tanda pintu keluar (emergency exit)	Pintu utama	1
3.	Tanda titik kumpul (assembly point)	Lapangan depan	1

Kerinci, 25 September 2025
 Peserta

 Muhammad Farhan, S.T.
 NIP. 20030902 202505 1 001

Gambar 4. Daftar kebutuhan dan titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi



c. Membuat prasarana pendukung evakuasi berupa tanda *Emergency Exit*, *Assembly Point*, serta petunjuk arah jalur Evakuasi dan mengkonsultasikannya kepada mentor.



Gambar 6. Desain prasarana pendukung evakuasi Dinas PUPR



Gambar 7. Melakukan konsultasi dengan mentor

C. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

a. Mengidentifikasi dan mengumpulkan referensi contoh prasarana pendukung evakuasi

Proses identifikasi dan pengumpulan referensi prasarana pendukung evakuasi dilakukan dengan menyusun daftar kebutuhan sarana yang relevan, seperti rambu *Emergency Exit* dan tanda *Assembly Point*, serta petunjuk arah jalur evakuasi. Penulis kemudian menelusuri regulasi, pedoman teknis, dan contoh penerapan terbaik di instansi lain untuk memperoleh referensi yang sesuai dengan kondisi kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. Semua informasi dicatat secara sistematis dengan memperhatikan keakuratan sumber dan kesesuaian dengan standar keselamatan kerja. Produk akhir yang dihasilkan berupa kumpulan referensi prasarana pendukung evakuasi yang lengkap, valid, dan mudah dipahami, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan penyediaan sarana keselamatan yang efektif di lingkungan kantor.



b. Melakukan survey dan identifikasi titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi

Proses survei dan identifikasi titik pemasangan prasarana pendukung evakuasi dilakukan dengan menyiapkan daftar kebutuhan lokasi, mempelajari denah kantor, serta melakukan pengamatan langsung di area kerja untuk menentukan posisi yang paling strategis bagi pemasangan rambu *Emergency Exit*, tanda *Assembly Point*, dan petunjuk arah jalur evakuasi. Setiap temuan dicatat secara sistematis dan dibandingkan dengan ketentuan standar keselamatan agar hasilnya akurat dan sesuai kebutuhan. Produk akhir yang dihasilkan berupa data titik pemasangan yang lengkap, jelas, dan telah diverifikasi, sehingga dapat dijadikan dasar yang andal untuk perencanaan dan pemasangan prasarana pendukung.

c. Membuat prasarana pendukung evakuasi berupa tanda *Emergency Exit*, *Assembly Point*, serta petunjuk arah jalur Evakuasi dan mengkonsultasikannya kepada mentor.

Proses pembuatan prasarana pendukung evakuasi dilakukan dengan mengolah data hasil survei titik pemasangan, memilih desain yang sesuai standar keselamatan, serta menentukan ukuran, warna, dan simbol yang mudah dikenali oleh pengguna kantor. Penulis merancang tanda *Emergency Exit*, *Assembly Point*, dan petunjuk arah jalur evakuasi menggunakan acuan regulasi serta contoh praktik terbaik, kemudian mengkonsultasikan hasil rancangan kepada mentor untuk mendapatkan masukan dan memastikan kesesuaian dengan kondisi lapangan. Produk akhir yang dihasilkan berupa desain prasarana pendukung evakuasi yang rapi, jelas, dan sesuai standar untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pegawai maupun masyarakat di Dinas PUPR Kerinci.

D. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi

Kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Dinas PUPR, khususnya misi pada poin 3 dan 5, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta melaksanakan program infrastruktur yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses identifikasi, survei, dan perancangan prasarana pendukung evakuasi, pegawai memperoleh pengalaman belajar yang memperkuat kemampuan teknis, ketelitian, dan tanggung jawab dalam mendukung keselamatan kerja. Hasil kegiatan berupa peta evakuasi dan prasarana pendukung yang menjadi bagian dari upaya mendukung keselamatan dan kenyamanan di lingkungan kantor. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi aparatur, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih aman, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat yang mengakses layanan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.



E. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

Apabila kegiatan penyusunan peta evakuasi dan pembuatan prasarana pendukungnya tidak dilaksanakan dengan berpedoman pada Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK, maka kualitas proses dan hasilnya dapat menurun secara signifikan. Bagi satuan kerja, ketiadaan penerapan nilai Akuntabel, Kompeten, dan Kolaboratif berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan data, ketidaktepatan desain, serta kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai standar keselamatan maupun kebutuhan organisasi. Hal ini dapat mengurangi kredibilitas Dinas PUPR dalam menyediakan sarana keselamatan kerja dan pelayanan publik yang aman. Sementara itu, bagi masyarakat yang datang untuk memperoleh layanan, peta evakuasi atau rambu keselamatan yang tidak jelas dan tidak valid dapat menimbulkan kebingungan serta memperbesar risiko ketika terjadi keadaan darurat. Dengan demikian, penerapan NDS pada setiap tahapan kegiatan sangat penting untuk menjamin mutu hasil kerja, memperkuat profesionalisme pegawai, serta menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.



b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		Muhammad Farhan		
Satuan Kerja		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1	25 September 2025	Perbaiki desain prasarana pendukung evakuasi	Tersedianya desain prasarana pendukung evakuasi sesuai dengan saran perbaikan	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		Muhammad Farhan		
Satuan Kerja		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor



Lampiran 4. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-5

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No. 4	Melakukan sosialisasi kepada bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	5 – 11 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/<i>Evidence</i>	1. Tersedianya kuisisioner sosialisasi
	2. Tersedianya daftar kebutuhan dan panitia sosialisasi
	3. Tersedianya dokumentasi (foto/vidio) kegiatan sosialisasi
	4. Tersedianya berita acara dan catatan hasil kegiatan sosialisasi
A. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan 1. Menentukan jadwal dan menyiapkan bahan sosialisasi yang dikoordinasikan kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi a. Akuntabel Dalam kegiatan menentukan jadwal dan menyiapkan bahan sosialisasi yang dikoordinasikan kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi, penulis menunjukkan nilai akuntabel dengan memastikan seluruh proses dilakukan secara terstruktur. Penulis menyusun jadwal sosialisasi berdasarkan ketersediaan waktu yang realistis serta menyesuaikannya dengan agenda kerja bidang terkait. Selanjutnya, bahan sosialisasi disiapkan dengan merujuk pada data dan regulasi yang valid, serta dicatat secara rapi agar mudah ditinjau kembali. Dengan langkah ini, setiap keputusan dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, sekaligus menjamin bahwa kegiatan sosialisasi terlaksana secara transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. b. Harmonis Dalam kegiatan menentukan jadwal dan menyiapkan bahan sosialisasi yang dikoordinasikan kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi, penulis menunjukkan nilai harmonis dengan membangun komunikasi yang baik serta menghargai pendapat dari pihak terkait. Penulis berkoordinasi secara terbuka dan saling menghormati agar jadwal yang disusun dapat diterima bersama tanpa menimbulkan tumpang tindih	



agenda. Selain itu, dalam penyusunan bahan sosialisasi, penulis berusaha menyesuaikan materi agar mudah dipahami oleh seluruh peserta, sehingga tercipta suasana kerja yang saling mendukung dan kondusif. Dengan penerapan nilai harmonis ini, kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara efektif dengan memperkuat kerja sama dan kebersamaan.

c. Kolaboratif

Dalam kegiatan menentukan jadwal dan menyiapkan bahan sosialisasi yang dikoordinasikan kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi, penulis menunjukkan nilai kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses perencanaan. Penulis berkoordinasi secara aktif dengan pimpinan dan rekan kerja untuk menyamakan persepsi terkait waktu, tempat, serta materi yang akan disampaikan agar kegiatan dapat berjalan efektif. Setiap masukan dan saran dari pihak terkait diterima dengan terbuka dan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan jadwal serta penyempurnaan bahan sosialisasi. Melalui kerja sama yang baik ini, kegiatan dapat tersusun secara komprehensif dan mencerminkan semangat kebersamaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

2. Melakukan sosialisasi peta evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi

a. Akuntabel

Dalam kegiatan melakukan sosialisasi peta evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi, penulis menunjukkan nilai akuntabel dengan menyampaikan informasi secara jelas, transparan, dan sesuai dengan data serta regulasi yang berlaku. Materi yang dipresentasikan telah disiapkan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh peserta. Seluruh pertanyaan atau masukan yang muncul dicatat dengan rapi untuk ditindaklanjuti, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hasil kegiatan. Dengan cara ini, pelaksanaan sosialisasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi isi maupun proses, serta menjadi acuan yang valid bagi peningkatan kesiapsiagaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

b. Harmonis

Dalam kegiatan melakukan sosialisasi peta evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi, penulis menunjukkan nilai harmonis dengan membangun suasana yang inklusif dan saling menghargai. Penulis menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami serta membuka ruang dialog agar peserta dapat memberikan masukan maupun pertanyaan secara nyaman. Selain itu, penulis mengutamakan sikap saling menghormati sehingga terjalin kerja sama yang baik antara penyelenggara dan peserta. Dengan penerapan nilai harmonis ini, sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat kebersamaan.



c. Kolaboratif

Dalam kegiatan melakukan sosialisasi peta evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi, penulis menunjukkan nilai kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan. Penulis bekerja sama dengan Kepala Bidang, staf teknis, dan peserta sosialisasi untuk menciptakan suasana interaktif dan saling mendukung. Setiap peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun usulan yang dapat memperkaya isi kegiatan. Selain itu, koordinasi antarbagian dilakukan agar sarana pendukung seperti media presentasi, dokumentasi, dan tempat kegiatan tersedia dengan baik. Melalui penerapan nilai kolaboratif ini, kegiatan sosialisasi berjalan lebih efektif, partisipatif, dan menghasilkan pemahaman bersama tentang pentingnya peta serta prasarana evakuasi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

3. Melakukan tanya jawab dan menyebarkan kuisisioner sosialisasi

a. Berorientasi Pelayanan

Dalam kegiatan melakukan tanya jawab dan menyebarkan kuisisioner sosialisasi, penulis menunjukkan nilai berorientasi pelayanan dengan memberikan penjelasan yang jelas, sabar, dan responsif terhadap setiap pertanyaan dari peserta. Penulis berupaya memastikan bahwa seluruh kebutuhan informasi peserta terpenuhi sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Selain itu, penyebaran kuisisioner dilakukan dengan ramah dan terbuka untuk memperoleh masukan yang konstruktif. Dengan sikap ini, peserta merasa dihargai dan dilayani dengan baik.

b. Akuntabel

Dalam kegiatan melakukan tanya jawab dan menyebarkan kuisisioner sosialisasi, penulis menunjukkan nilai akuntabel dengan memberikan jawaban berdasarkan data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pertanyaan peserta dijawab secara jelas dan transparan, disertai rujukan yang sesuai agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah. Hasil pengisian kuisisioner juga dicatat dan dihimpun secara rapi untuk dijadikan bahan evaluasi kegiatan. Dengan penerapan nilai akuntabel ini, proses tanya jawab dan kuisisioner dapat dipertanggungjawabkan baik secara isi maupun pelaksanaan, sehingga mendukung peningkatan kualitas sosialisasi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

c. Kolaboratif

Dalam kegiatan melakukan tanya jawab dan menyebarkan kuisisioner sosialisasi, penulis menunjukkan nilai kolaboratif dengan mendorong partisipasi aktif seluruh peserta. Penulis membuka ruang diskusi yang sehat sehingga tercipta pertukaran informasi dua arah antara penyelenggara dan



peserta. Masukan dari kuisisioner dikumpulkan dan dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan bersama, sehingga hasil sosialisasi lebih bermanfaat. Dengan penerapan nilai kolaboratif ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi, tetapi juga sarana membangun kerja sama dan kebersamaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

B. Teknik Aktualisasi Yang Digunakan dan Bukti Fisik Kegiatan

a. Menentukan jadwal dan menyiapkan bahan sosialisasi yang dikoordinasikan kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi

docs.google.com/forms/d/1j8Nz5j9QVPMW12KqqaLLu5_BhVGeQSRJsqDg/preview

Mode pratinjau

Dipublikasikan Salin link responden

Kuisisioner Sosialisasi Pembuatan Peta Jalur Evakuasi

Sosialisasi Peta Evakuasi Bencana Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

A. Data Responden

1. Nama *

Jawaban Anda

Gambar 1. Kuisisioner sosialisasi

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Pemerintahan Bukit Tinggi, Bukak, Kode Pos 37162
Email: p4up@kerinci.go.id Website: http://du.kerinci.go.id

DAFTAR KEBUTUHAN DAN PANITIA SOSIALISASI

1. Daftar Kebutuhan
Berikut merupakan daftar kebutuhan saat acara sosialisasi:
a. Proyektor (1 unit)
b. Kabel HDMI (1 unit)
c. Laptop (1 unit)
d. Kursi Peserta dan Panitia (25 unit)
e. Snack Katak (25 kotak)
f. Air Mineral Galas (1 kardus)
g. Materi Sosialisasi

2. Panitia Sosialisasi
Berikut merupakan panitia acara sosialisasi:
a. Muhammad Farhan, S.T.
b. Muhammad Rizal Muhamad, S.T.A.P.
c. Yayang Ramanda Putri, S.T.

Kepala Bidang Tanggap Darurat
dan Bina Jasa Konstruksi

Ir. Supriadi, S.T.
NIP. 19750912 200502 2 005

Gambar 2. Daftar kebutuhan dan panitia



Gambar 3. Berkoordinasi dan Meminta Persetujuan Kepala Bidang Tanggap Darurat

b. Melakukan sosialisasi peta evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi







Gambar 4. Dokumentasi sosialisasi

c. Melakukan tanya jawab dan menyebarkan kuisioner sosialisasi

DAFTAR HADIR SOSIALISASI			
Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi			
Dinas PUPR Kabupaten Kerinci			
HARI/TANGGAL	:		
TEMPAT	:		
ACARA	:		
	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. Maya Novetti Handayani, ST	Kepala Dinas	1. -
2	Dr. Ramliar, SKM, M.Kes	Sekretaris	2. -
3	Ir. Saprida, ST	Kepala Bidang	3.
4	Ir. Khusmi Hayati, ST, M.Si	Fungsional Umum	4.
5	Saman, S.Sos	Staf Pelaksana	5.
6	Ir. Jemi Satria Putra, ST	Staf Pelaksana	6.
7	Hendi Jemi Putra	Staf Pelaksana	7.
8	Mipiya	Staf Pelaksana	8.
9	M. Rizal Muharam, S.Tr.AP	Staf Pelaksana	9.
10	Yayang Ramanda Putri, ST	Staf Pelaksana	10.
11	Alfin Rizki Akbar, S.Ap	Staf Pelaksana	11.
12	Anggi Puspita, S.E	Staf Pelaksana	12.
13	Anisa Eka Partika, S.E	Staf Pelaksana	13.
14	Arif Muhammad Rahman, S.Pd	Staf Pelaksana	14.
15	Ayu Ultri Montana, S.Ap	Staf Pelaksana	15.
16	Dewi Sartika, S.H	Staf Pelaksana	16.
17	Megi Nurman A, S.Ap	Staf Pelaksana	17.
18	Ofi Rica Casilda Nabila, S.E	Staf Pelaksana	18.
19	Rudini, S.E	Staf Pelaksana	19.
20	Sumadi, A.Md	Staf Pelaksana	20.
21	Prayoga Tayosa, S.H	Staf Pelaksana	21.

Kepala Bidang Tanggap Darurat
dan Bina Jasa Konstruksi

Ir. SAPRIDA, ST
NIP. 19750912 200502 2 005

Gambar 5. Berita acara dan daftar hadir sosialisasi

C. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

a. Menentukan jadwal dan menyiapkan bahan sosialisasi yang dikoordinasikan kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi

Proses menentukan jadwal dan menyiapkan bahan sosialisasi dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan waktu yang tepat agar kegiatan tidak berbenturan dengan agenda kerja lainnya. Penulis kemudian



menyusun alternatif jadwal sosialisasi dan mengoordinasikannya kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi untuk mendapatkan persetujuan. Setelah jadwal disepakati, penulis menyiapkan bahan sosialisasi berupa materi presentasi dan dokumen pendukung yang berisi informasi mengenai peta evakuasi dan prasarana pendukungnya. Penyusunan bahan dilakukan dengan mengacu pada data dan regulasi yang berlaku, serta disusun secara sistematis agar mudah dipahami peserta. Produk akhir berupa bahan sosialisasi yang valid, terstruktur, serta siap digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

b. Melakukan sosialisasi peta evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi

Proses sosialisasi peta evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi dilakukan dengan menyampaikan materi yang telah disusun dalam bentuk presentasi serta penjelasan langsung kepada peserta. Penulis memaparkan fungsi peta evakuasi, tata letak jalur, serta jenis prasarana pendukung seperti rambu, tanda arah, dan titik kumpul. Selama sosialisasi, penulis menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta memberikan contoh penerapan nyata di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggapan sehingga proses penyampaian informasi berlangsung interaktif. Produk akhir dari kegiatan ini berupa pemahaman yang lebih baik dari peserta mengenai pentingnya peta evakuasi dan prasarana pendukung, serta adanya kesadaran kolektif untuk mendukung penerapan sistem keselamatan di kantor.

c. Melakukan tanya jawab dan menyebarkan kuisioner sosialisasi

Proses tanya jawab dan penyebaran kuisioner sosialisasi dilakukan setelah penyampaian materi selesai agar peserta dapat memperdalam pemahaman terhadap peta evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi. Penulis memfasilitasi sesi diskusi interaktif dengan memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun masukan secara terbuka. Setiap pertanyaan dijawab dengan jelas dan disesuaikan dengan data maupun regulasi yang berlaku, sehingga informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi

Kegiatan sosialisasi peta evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi berkontribusi secara langsung pada pencapaian Misi Dinas PUPR Kabupaten Kerinci nomor 3, yaitu menciptakan SDM yang berkualitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melalui kegiatan ini, ASN mendapatkan edukasi yang relevan mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana, tata cara evakuasi, serta pemanfaatan prasarana pendukung



keselamatan di lingkungan kerja. Peningkatan pengetahuan tersebut mendorong terbentuknya pegawai yang lebih sigap, terampil, dan mampu menjalankan peran pelayanan publik dengan lebih baik.

Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan visi dan tujuan organisasi dalam mewujudkan pelayanan infrastruktur yang tidak hanya andal, tetapi juga aman bagi masyarakat. Dengan adanya edukasi yang diberikan melalui sosialisasi, ASN Dinas PUPR dapat meningkatkan kualitas pelayanan, baik secara internal kepada rekan kerja maupun eksternal kepada masyarakat, terutama dalam aspek penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat pencapaian tujuan strategis organisasi secara menyeluruh.

E. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

Apabila kegiatan sosialisasi peta evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi tidak dilaksanakan berdasarkan nilai dasar ASN BerAKHLAK, maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif, baik terhadap satuan kerja maupun masyarakat.

Bagi satuan kerja, ketiadaan penerapan nilai Akuntabel dapat menyebabkan penyusunan jadwal dan bahan sosialisasi yang tidak jelas, tidak transparan, serta sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakefisienan, duplikasi kegiatan, bahkan menurunkan kredibilitas unit kerja. Tanpa nilai Harmonis dan Kolaboratif, koordinasi antarpegawai maupun antarbidang dapat terganggu, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kurangnya kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Kualitas SDM pun tidak berkembang secara optimal karena kegiatan yang dilakukan hanya bersifat formalitas.

Bagi masyarakat, dampak yang ditimbulkan dapat berupa rendahnya kualitas pelayanan publik. Sosialisasi yang tidak dilandasi nilai Berorientasi Pelayanan akan membuat masyarakat, khususnya pengguna layanan Dinas PUPR, tidak mendapatkan informasi yang jelas dan edukasi yang memadai terkait kesiapsiagaan bencana. Jika nilai Loyal dan Adaptif tidak diterapkan, maka penyampaian materi sosialisasi akan cenderung kaku, tidak inovatif, dan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, tujuan utama meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap keselamatan akan sulit tercapai, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas PUPR.

Dengan demikian, tidak diterapkannya NDS dalam kegiatan aktualisasi akan berdampak pada menurunnya efektivitas internal sekaligus kualitas pelayanan eksternal, sehingga visi dan misi organisasi sulit diwujudkan.



b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		Muhammad Farhan		
Satuan Kerja		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1	06 Oktober 2025	Perbaiki paparan sosialisasi	Tersedianya paparan sosialisasi yang lebih baik	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		Muhammad Farhan		
Satuan Kerja		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor



Lampiran 5. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-6

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No. 5	Melakukan Evaluasi dan Konsultasi Hasil Aktualisasi bersama Mentor
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	12 – 18 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/<i>Evidence</i>	1. Tersedianya draft final laporan sosialisasi
	2. Tersedianya draft laporan aktualisasi
	3. Tersedianya catatan hasil evaluasi dan laporan akhir aktualisasi
A. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan 1. Membuat Laporan Sosialisasi a. Akuntabel Pada tahap ini, peserta menyusun laporan kegiatan sosialisasi hasil pembuatan peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Penerapan nilai Akuntabel tercermin dari ketelitian dalam mendokumentasikan seluruh proses dan hasil kegiatan secara lengkap, mulai dari tujuan, sasaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan sosialisasi. Peserta memastikan bahwa setiap data dan informasi yang disajikan bersumber dari hasil kegiatan nyata di lapangan, serta disusun secara transparan sesuai dengan bukti fisik dan dokumentasi yang ada. Dengan demikian, laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi dasar evaluasi bagi instansi dalam peningkatan kegiatan serupa di masa mendatang. b. Harmonis Pada tahap ini, peserta menyusun laporan kegiatan sosialisasi hasil pembuatan peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi dengan melibatkan rekan kerja sebagai pihak yang turut memberikan masukan terhadap isi laporan. Penerapan nilai Harmonis tercermin dari sikap terbuka dan saling menghargai dalam proses komunikasi, baik saat mengonfirmasi data kegiatan maupun saat menerima saran perbaikan. Peserta menjaga hubungan kerja yang baik dengan seluruh pihak terkait agar laporan yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan kerja sama di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.	



c. Kolaboratif

Peserta menyusun laporan kegiatan sosialisasi hasil pembuatan peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti mentor, rekan kerja, dan panitia kegiatan. Penerapan nilai Kolaboratif terlihat dari semangat kerja sama dalam pengumpulan data, penyusunan dokumentasi, serta verifikasi hasil pelaksanaan kegiatan agar laporan yang dihasilkan akurat dan komprehensif. Peserta berkoordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan laporan mencerminkan hasil nyata di lapangan serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi instansi.

2. Membuat Laporan Aktualisasi

a. Akuntabel

Peserta menyusun laporan aktualisasi yang memuat keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan nilai Akuntabel tercermin melalui penyusunan laporan secara sistematis, lengkap, dan berdasarkan data serta bukti kegiatan yang valid. Setiap informasi dalam laporan disusun dengan memperhatikan kejelasan sumber dan hasil nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dan kejujuran dijaga dalam setiap bagian laporan agar dokumen akhir mencerminkan transparansi serta integritas peserta sebagai ASN yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan hasil kerjanya.

b. Adaptif

Peserta menyusun laporan aktualisasi dengan menyesuaikan format, isi, dan penyajiannya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan serta arahan dari mentor. Penerapan nilai Adaptif tampak dari kemampuan peserta dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan laporan. Setiap saran perbaikan diterima dengan terbuka dan diterapkan secara tepat agar laporan menjadi lebih relevan, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan penyelenggara LATSAR. Sikap terbuka terhadap pembaruan dan keinginan untuk memperbaiki hasil kerja menunjukkan kemampuan peserta beradaptasi demi menghasilkan laporan yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi instansi.

c. Kompeten

Peserta menyusun laporan aktualisasi dengan menerapkan kemampuan analisis, ketelitian, dan keterampilan teknis yang diperoleh selama pelatihan. Penerapan nilai Kompeten terlihat dari cara peserta mengolah data hasil kegiatan menjadi laporan yang sistematis, jelas, dan sesuai dengan pedoman penyelenggara LATSAR. Setiap bagian laporan disusun berdasarkan pemahaman yang baik terhadap alur kegiatan dan tujuan aktualisasi, sehingga menghasilkan dokumen yang informatif dan mudah



dipahami. Kemampuan dalam menggabungkan hasil observasi, dokumentasi, serta refleksi nilai-nilai ASN menunjukkan peningkatan profesionalisme dan kapasitas peserta sebagai ASN yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

3. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor

a. Akuntabel

Peserta melaksanakan evaluasi hasil aktualisasi bersama mentor untuk meninjau kembali seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan akhir. Penerapan nilai Akuntabel tercermin dari kesungguhan peserta dalam mempertanggungjawabkan setiap hasil kerja dan menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan secara terbuka. Peserta mencatat seluruh masukan, koreksi, serta saran dari mentor sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas laporan. Sikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab yang ditunjukkan dalam proses evaluasi ini menjadi bentuk nyata penerapan nilai Akuntabel serta komitmen untuk terus memperbaiki kinerja agar lebih baik.

b. Adaptif

Peserta melakukan evaluasi hasil aktualisasi bersama mentor dengan meninjau pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi selama proses aktualisasi. Penerapan nilai Adaptif terlihat dari kemampuan peserta dalam menerima masukan, kritik, dan saran perbaikan dari mentor secara terbuka, kemudian menyesuaikan hasil laporan sesuai rekomendasi yang diberikan. Sikap fleksibel dan responsif terhadap perubahan menjadi kunci dalam memperbaiki dan menyempurnakan laporan agar lebih relevan dan berkualitas. Melalui proses ini, peserta menunjukkan kesiapan untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan profesionalisme sebagai ASN yang mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan dinamika pekerjaan.

c. Loyal

Peserta melaksanakan evaluasi hasil aktualisasi bersama mentor sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Penerapan nilai Loyal tampak dari kesungguhan peserta dalam melaksanakan arahan serta kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara LATSAR dan instansi asal. Peserta menunjukkan sikap patuh terhadap prosedur evaluasi, menghargai setiap masukan dari mentor, dan berkomitmen untuk memperbaiki laporan sesuai pedoman yang berlaku. Melalui penerapan nilai Loyal ini, peserta menegaskan dedikasinya sebagai ASN yang setia pada tugas, menjunjung tinggi nilai organisasi, serta berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik.



d. Harmonis

Peserta melaksanakan evaluasi hasil aktualisasi bersama mentor dengan menjunjung tinggi etika komunikasi dan rasa saling menghargai. Penerapan nilai Harmonis tercermin dari sikap sopan, terbuka, dan penuh rasa hormat dalam menyampaikan hasil kegiatan serta menerima masukan dari mentor. Proses evaluasi dilakukan dengan suasana yang positif dan saling mendukung, sehingga menciptakan hubungan kerja yang baik antara peserta dan mentor. Melalui penerapan nilai Harmonis ini, peserta menunjukkan kemampuan menjaga keharmonisan dan kerja sama yang konstruktif dalam lingkungan kerja, sekaligus memperkuat budaya saling menghargai di instansi.

B. Teknik Aktualisasi Yang Digunakan dan Bukti Fisik Kegiatan

a. Membuat laporan sosialisasi



Gambar 1. Membuat laporan sosialisasi

 PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tinggi, Siliak, Kode Pos 37162 Pos-el: pu@kerincikab.go.id Website: http://pu.kerincikab.go.id		 PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tinggi, Siliak, Kode Pos 37162 Pos-el: pu@kerincikab.go.id Website: http://pu.kerincikab.go.id	
Kepada : Yth. Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi Dari : Muhammad Fathan, S.T. Tanggal : .. Sifat : .. Lampiran : 2 Eksemplar Hal : Laporan Hasil Sosialisasi		C. Maksud dan Tujuan 1) Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai arah jalur evakuasi dan titik kumpul aman. 2) Meningkatkan kemampuan tanggap darurat di kantor. 3) Memastikan tersedianya sarana dan prasarana evakuasi sesuai standar keselamatan kerja dan peraturan yang berlaku.	
I. Pendahuluan A. Latar Belakang Kabupaten Kerinci merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, seperti gempa bumi dan tanah longsor. Kondisi geografis yang berada di kawasan pegunungan menuntut adanya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di berbagai sektor, termasuk di lingkungan perkantoran pemerintahan. Sebagai instansi teknis di bidang infrastruktur dan pelayanan publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pembuatan peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi sebagai panduan bagi pegawai dan pengunjung dalam menghadapi situasi darurat. Kegiatan sosialisasi pembuatan peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi bertujuan meningkatkan pemahaman pegawai tentang arah evakuasi, titik kumpul, serta sarana keselamatan yang tersedia. Selain menjadi bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, kegiatan ini juga merupakan wujud komitmen Dinas PUPR Kabupaten Kerinci dalam membangun budaya kerja yang tanggap bencana dan mendukung pelayanan publik yang aman serta berkualitas. B. Landasan Hukum 1) Peraturan LAN No. 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara		II. Kegiatan yang dilaksanakan 1) Mensosialisasikan peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci 2) Diskusi dan Tanya jawab dengan peserta sosialisasi (Staff Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi). III. Hasil Kegiatan sosialisasi pembuatan peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci telah terlaksana dengan baik dan lancar. Sosialisasi diikuti oleh seluruh pegawai dan berjalan interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, serta peninjauan langsung lokasi jalur evakuasi di lingkungan kantor. Dari kegiatan ini diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pegawai memahami arah jalur evakuasi, titik kumpul, dan lokasi sarana keselamatan seperti APAR dan rambu evakuasi. 2) Terbentuk peningkatan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan kerja. IV. Kesimpulan dan Saran Kegiatan sosialisasi pembuatan peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui kegiatan ini, pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai arah jalur evakuasi, titik kumpul aman, serta penggunaan sarana pendukung keselamatan di lingkungan kerja. Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, terib, dan sesuai dengan standar keselamatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.	



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Sukak, Kode Pos 37162
Pos-el: puang@kerincikab.go.id Website: http://pu.kerincikab.go.id

V. Penutup

Dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi pembuatan peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung evakuasi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, diharapkan seluruh pegawai dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi situasi darurat di lingkungan kerja. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan sekali waktu, tetapi dapat terus diingklatkan melalui pemberian peta, penambahan sarana keselamatan, serta pelatihan berkala bagi seluruh pegawai. Dengan demikian, tercipta budaya kerja yang peduli terhadap keselamatan dan mendukung tercapainya visi serta misi Dinas PUPR Kabupaten Kerinci dalam memberikan pelayanan publik yang aman dan berkualitas.

Kerinci, 05 Oktober 2025
Pejabat Pelaksana Dasar CPNS,

Muhammad Faniar, S.T.
NIP. 20020802 202505 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Sukak, Kode Pos 37162
Pos-el: puang@kerincikab.go.id Website: http://pu.kerincikab.go.id

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Sukak, Kode Pos 37162
Pos-el: puang@kerincikab.go.id Website: http://pu.kerincikab.go.id



Gambar 1. Dokumentasi sosialisasi

No	Nama	Unit Kerja	Waktu	Tempat
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...

Gambar 2. Daftar hadir sosialisasi



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Sukak, Kode Pos 37162
Pos-el: puang@kerincikab.go.id Website: http://pu.kerincikab.go.id



Gambar 3. Desain prasarana pendukung evakuasi Dinas PUPR



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Sukak, Kode Pos 37162
Pos-el: puang@kerincikab.go.id Website: http://pu.kerincikab.go.id



Gambar 4. Desain peta evakuasi Dinas PUPR

Gambar 2. Laporan Sosialisasi



b. Membuat laporan aktualisasi



Gambar 3. Membuat laporan aktualisasi

  KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III PEMBUATAN DESAIN PETA JALUR EVAKUASI DAN PRASARANA PENDUKUNG EVAKUASI MELALUI PEMBUATAN LEAFLET DAN POSTER DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI Disusun oleh: Nama : Muhammad Farhan, S.T. NIP : 20020802 202505 1 001 Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Pertama Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Kelas/Kelompok : 4 No. Absen : 40 Angkatan : XIV	 LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKTUALISASI JUDUL : Pembuatan Desain Peta Jalur Evakuasi dan Prasarana Pendukung Evakuasi melalui pembuatan leaflet dan poster di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci. NAMA : Muhammad Farhan, S.T. NIP : 20020802 202505 1 001 PANGKAT/GOL : Penata Muda III/A JABATAN : Analis Kebencanaan Ahli Pertama ANGKATAN/KELOMPOK : XIV/4 NO. ABSEN : 40
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2025	Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal ... Oktober Tahun 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi. Bukittinggi, ... Oktober 2025 Coach Mentor Faisal Roza, S.Kom., M.Kom. Ir. Frans Mellas Pratama, S.T., M.T. NIP. 19761014 200112 1 001 NIP. 19820118 201101 1 003 Mengetahui Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi Sarjayadi, S.S., M.AP NIP. 19700304 199603 1 001

Gambar 4. Laporan Aktuliasasi



c. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor

 PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Sialak, Kode Pos 37162 Email: ppu@kerincikab.go.id Website: http://pu.kerincikab.go.id	
CATATAN HASIL EVALUASI	
Narasumber	: Ir. Frans Mellas Pratama, S.T., M.T.
Jabatan	: Pengelola Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan
Tanggal	:
Tempat	: Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
No.	Notulensi Konsultasi
- Perbaiki typo pada laporan aktualisasi - Kegiatan sosialisasi sebaiknya diadakan secara berkala - Peta jalur evakuasi diperbarui secara berkala menyesuaikan dengan perubahan lingkungan kantor - Sarana dan prasarana pendukung evakuasi lainnya dilengkapi di masa yang akan datang	
Mengetahui Mentor  Frans Mellas Pratama, S.T., M.T. NIP. 19820118 201101 1 003 Kerinci, Oktober 2025 Peserta  Muhammad Farhan, S.T. NIP. 20020802 202505 1 001	

Gambar 5. Catatan hasil evaluasi



Gambar 6. Kegiatan Evaluasi

C. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

a. Membuat laporan sosialisasi

Proses penyusunan laporan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data dan dokumentasi yang dihasilkan selama pelaksanaan sosialisasi peta jalur evakuasi dan prasarana pendukung



evakuasi. Peserta menelaah kembali hasil kegiatan, termasuk daftar hadir, dokumentasi foto, materi sosialisasi, serta tanggapan peserta sosialisasi, untuk disusun secara sistematis dalam bentuk laporan. Penyusunan dilakukan dengan memperhatikan ketepatan isi, kejelasan informasi, dan kesesuaian dengan format pelaporan instansi.

Produk yang dihasilkan berupa laporan kegiatan sosialisasi yang lengkap, rapi, dan dapat dijadikan bukti fisik pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut menggambarkan tahapan kegiatan secara jelas, mencakup tujuan, waktu, pelaksana, peserta, dan hasil. Kualitas laporan menunjukkan tingkat ketelitian dan akuntabilitas yang tinggi karena disusun berdasarkan data nyata dan telah diverifikasi oleh pihak terkait.

b. Membuat laporan aktualisasi

Proses penyusunan laporan aktualisasi dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Peserta mengumpulkan seluruh data pendukung seperti catatan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi foto, hasil koordinasi, serta lembar evaluasi mentor. Seluruh informasi tersebut diolah dan disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan laporan LATSAR. Peserta memastikan bahwa setiap bagian laporan, mulai dari latar belakang, perumusan core isu, hingga hasil dan tindak lanjut, menggambarkan keterkaitan logis antarbagian serta penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Produk yang dihasilkan berupa laporan aktualisasi LATSAR yang lengkap, valid, dan terstruktur dengan baik. Laporan disusun menggunakan bahasa formal, sistematika yang rapi, serta dilengkapi bukti pendukung yang relevan. Kualitas produk menunjukkan tingkat kompetensi peserta dalam mengintegrasikan hasil kegiatan ke dalam laporan ilmiah terapan, yang tidak hanya memenuhi standar administrasi pelatihan, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi instansi.

c. Melakukan evaluasi dan menyerahkan laporan aktualisasi kepada mentor

Proses evaluasi dilakukan melalui pertemuan antara peserta dan mentor untuk meninjau keseluruhan hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi, termasuk laporan sosialisasi dan laporan aktualisasi yang telah disusun. Peserta mempresentasikan hasil kegiatan, menjelaskan capaian, kendala, serta solusi yang diterapkan selama pelaksanaan. Mentor memberikan masukan, saran, dan koreksi terhadap substansi maupun teknis penyusunan laporan agar hasil akhir sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh penyelenggara LATSAR. Peserta mencatat setiap masukan dengan penuh tanggung jawab dan menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan laporan.



Produk yang dihasilkan berupa laporan aktualisasi yang telah diperbaiki dan disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi. Laporan akhir menjadi dokumen yang lebih lengkap, akurat, dan representatif terhadap seluruh proses kegiatan. Kualitas produk mencerminkan peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, serta kemampuan peserta dalam menerima umpan balik secara konstruktif demi menghasilkan karya yang lebih baik dan bermanfaat bagi instansi.

D. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi

Pelaksanaan kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci, khususnya dalam mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur yang andal, aman, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi, peserta membantu instansi dalam memastikan hasil kegiatan terdokumentasi dengan baik, akurat, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan di bidang keselamatan kerja.

Kegiatan ini mendukung misi Dinas PUPR pada poin 3 dan 5, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta melaksanakan program infrastruktur yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Proses evaluasi bersama mentor mendorong peningkatan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas secara akuntabel dan profesional. Hasilnya, instansi memperoleh laporan yang valid dan terukur, yang menjadi referensi penting dalam penerapan budaya kerja berkeselamatan serta penguatan tata kelola organisasi menuju pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan.

E. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

Apabila kegiatan aktualisasi tidak dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi satuan kerja dan masyarakat. Tanpa nilai Akuntabel, hasil kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, laporan menjadi tidak valid, dan menurunkan kepercayaan terhadap profesionalitas satuan kerja. Jika nilai Kompeten tidak diterapkan, produk kegiatan seperti peta jalur evakuasi dapat memiliki kesalahan teknis dan tidak bermanfaat optimal. Ketiadaan nilai Harmonis dan Kolaboratif akan melemahkan koordinasi antarpegawai dan mentor, menimbulkan miskomunikasi, serta menghambat pencapaian tujuan bersama.

Selain itu, tanpa nilai Adaptif, peserta sulit menyesuaikan diri terhadap perubahan dan masukan, sehingga hasil kegiatan menjadi kaku dan tidak berkembang. Tidak diterapkannya nilai Loyal juga dapat menurunkan



komitmen terhadap instansi dan semangat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Dampak bagi masyarakat adalah menurunnya kepercayaan terhadap Dinas PUPR sebagai instansi pelayanan publik karena kegiatan yang dilaksanakan tidak mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan dan kualitas pelayanan. Akibatnya, manfaat dari kegiatan aktualisasi, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan lingkungan kerja, tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.



b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		Muhammad Farhan		
Satuan Kerja		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1	14 Oktober 2025	Perbaiki laporan aktualisasi	Tersedianya laporan aktualisasi yang lebih baik	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		Muhammad Farhan		
Satuan Kerja		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas PUPR Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor



DAFTAR PUSTAKA

- Angga, F. (2022). Digitalisasi registrasi penelitian kemasyarakatan (LITMAS) klien dewasa di balai pemasyarakatan kelas II Lahat. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 13(1). <https://doi.org/10.51903/jtikp.v13i1.297>.
- Artina, S. (2021). Optimalisasi proses pembelajaran PPKn melalui media pembelajaran inovatif di sekolah menengah pertama. *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 46–52.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2022). Laporan Tahunan Penanggulangan Bencana Indonesia. Jakarta: BNPB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. (2024). Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Kerinci. Kerinci: Badan Pusat Statistik.
- Bhidju, R. H. (2022). Upaya meningkatkan motivasi belajar murid kelas V SD Negeri Fatubai Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. *TEACHER: Jurnal Inovasi Karya Ilmiah Guru*, 2(2), 156–169. <https://doi.org/10.51878/teacher.v2i2.1316>
- BPBD Kerinci. (2018). 75 Percent of Kerinci Area is Disaster Prone. Retrieved August 26, 2020, from <http://metrojambi.com/read/2018/11/19/37419/75-persen-wilayah-kerinci-rawan-bencana.html>
- BNPB. (2023). Laporan Penanggulangan Bencana Indonesia. Jakarta: BNPB.



- Hidayat, M. R. (2022). Peningkatan kreatifitas pembelajaran Bahasa Indonesia siswa tingkat dasar melalui Project Learning Berbasis Merdeka Belajar. *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, 2(2). <https://doi.org/10.30821/eunoia.v2i2.2069>
- International Labour Organization (ILO). (2013). *Occupational Safety and Health Management System*. Geneva: ILO.
- Iqbal, M., & Kamaludin, A. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja pada Pekerja Pertambangan. *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan*, 2(1), 64–70.
- Iskandar, H., Maksum, H., & Nafisah, N. (2014). Faktor penyebab penurunan pelaporan insiden keselamatan pasien rumah sakit. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 28(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2014.028.01.27>
- Kementerian PANRB. (2020). *Modul LATSAR: Agenda III Manajemen ASN*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kirana, C. (2020). Peningkatan kemampuan menulis cerita bagi siswa kelas IV melalui media amplop literasi. *Edustream: Jurnal Pendidikan Dasar*, IV(1), 92–97. <https://doi.org/10.26740/eds.v4n1.p92-97>
- Kusumasari, B., & Alam, Q. (2012). Bridging the gaps: The role of local government capability and the management of a natural disaster in Bantul, Indonesia. *Natural Hazards*, 60(2), 761–779.



- Megasari, D., Syaiful, K., & Zamroni, A. (2021). Strategi pemasaran tanaman hias pada masa pandemi covid-19 di Mekar Jaya Nursery. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1, 329–341. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/semnaspk/article/view/52>
- Naser, H., Devi, N. K., & Wahdini, N. (2022). Calibrating the final results of the hay system of job evaluation using urgency, seriousness, and growth (USG) analysis in indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 37(1). <https://doi.org/10.22146/jieb.v37i1.1475>.
- Nuraeni, Rafiif, M. F., Kusumawandira, I. A., Ameviasari, P. F., Farisi, S. Al, & Hadiana, F. (2022). Sosialisasi “UMI ABI: Upaya mitigasi bencana banjir” kepada murid Sekolah Dasar Alam Pelopor Bandung. *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, 4(2), 230–237. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v4i2.18>
- Oktari, R. S., Munadi, K., & Ridwan, M. (2020). Disaster risk management and system of data collection for infrastructure damages in Indonesia. *Journal of Disaster Studies*, 14(2), 85–96.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER.04/MEN/1987 tentang P2K3.



- Rofiuddin, M. (2021). Optimalisasi laboratorium komputer sebagai center of statistical development di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. *Penamas: Journal of Community Service*, 1(1), 32–48. <https://doi.org/10.53088/penamas.v1i1.71>
- Saputra, D., Prasetyo, Y. T., & Abdullah, A. Z. (2020). Public trust and satisfaction towards local government services in disaster management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 50, 101698.
- SNI 03-1746-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Jalur Evakuasi dalam Bangunan Gedung.
- Syamsuriansyah, S., Hasanah, U., Chairunnisa, R., Andriani, H., & Bt Arifin, N. A. (2022). Kinerja pengisian dokumen rekam medis di Puskesmas Madapangga Bima NTB. *Jurnal Kesehatan*, 14(2). <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v14i2.23672>
- Tsaniyah, R. F., P, A. H., P, S. P., Y, A. M., MF, R. F., Erawantini, F., Suyoso, G. E. J., & Utami, Y. D. (2022). Analisis faktor penyebab utama kerusakan berkas rekam medis pada ruang filing di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. *J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, 3(4). <https://doi.org/10.25047/j-remi.v3i4.3449>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.



UNISDR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva: United Nations.

Yurianto, Y. (2020). Analisis penyusunan strategi dan program pembinaan usaha mikro kecil DKI Jakarta pada masa pandemic covid 19 dengan pendekatan USG dan SWOT. *Jurnal Riset Jakarta*, 13(2).
<https://doi.org/10.37439/jurnaldrd.v13i2.35>

Yurianto. (2021). Strategi BUMD Jakarta dalam mendukung kebijakan program ketahanan pangan. *Jurnal Agristan*, 3(2), 172–190.
<https://doi.org/10.37058/agristan.v3i2.3748>

Zulfan, A., Hadi, M. A., & Mairizwan, M. (2022). Identifikasi zona bahaya gempa bumi menggunakan metode mikrotremor HVSR di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Geofisika Indonesia*, 21(3), 145–156.
<https://repository.unja.ac.id/28597>.